

MASTERPLAN SMART CITY

KOTA BOGOR



BUKU #1

2017

DISKOMINFOSTANDI

**ANALISIS STRATEGI
SMART CITY KOTA BOGOR**





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
ANALISIS MASA DEPAN	1
1.1 SEJARAH BERDIRINYA KOTA BOGOR	1
1.2 PERKEMBANGAN KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2014	4
1.2.1 Letak Geografis	4
1.2.2 Pemerintahan	6
1.2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja	6
1.2.4 S o s i a l	7
1.2.5 Pertanian	9
1.2.6 Perindustrian dan Perdagangan	11
1.2.7 Perdagangan	12
1.2.8 Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata	13
1.2.9 Keuangan dan Harga-harga	14
1.2.10 Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk	15
1.2.11 Pendapatan Regional	16
1.2.12 Kemiskinan	16
1.3 ANALISIS KONDISI MASA DEPAN	17
1.3.1 Analisis Tren / Perkembangan Kota	17
1.3.2 Analisis Prilaku dan Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah ..	26
1.3.2.1 Perilaku Aparatur, Masyarakat dan Swasta Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	30
1.3.2.2 Inovasi Tahun 2016	31
1.3.2.3 Pengembangan dan Pendampingan Aspirasi Pengaduan	35
1.3.2.4 Pembangunan Zona Integritas	36
1.3.3 Analisis Daya Saing	37
1.3.3.1 Program Peningkatan Daya Saing dan Penanaman Modal	37
1.3.4 Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah	42
1.3.4.1 Visi dan Misi Dalam RPJPD	42
1.3.4.2 Prioritas Daerah	44
1.3.4.3 Kondisi Ekonomi	51
1.3.4.4 Kelembagaan Perangkat Daerah	54
.....	57
ANALISIS KESIAPAN KOTA BOGOR	57
2.1. ANALISIS STRUKTUR KOTA BOGOR	57



2.1.1. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.....	57
2.1.2. KUALITAS SUMBER DAYA PEMERINTAHAN.....	58
2.1.3. KAPASITAS KEUANGAN DAERAH	60
2.2. ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR	61
2.2.1. INFRASTRUKTUR FISIK	61
2.2.2. INFRASTRUKTUR DIGITAL	62
2.2.3. INFRASTRUKTUR SOSIAL	63
2.3. ANALISIS KESIAPAN SUPRASTRUKTUR.....	64
2.3.1. KESIAPAN KEBIJAKAN DAERAH	64
2.3.2. KESIAPAN KELEMBAGAAN DAERAH.....	65
2.3.3. KESIAPAN ORGANISASI MASYARAKAT DAERAH	70
.....	71
ANALISIS KESENJANGAN STRATEGIS	71
.....	74
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> KOTA BOGOR.....	74
4.1. SASARAN <i>SMART CITY</i> DAERAH	74
4.1.1. Smart Governance.....	75
4.1.2. Smart Branding.....	77
4.1.3. Smart Economy	78
4.1.4. Smart Living	79
4.1.5. Smart Society.....	82
4.1.6. Smart Environment	84
4.2. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN DAERAH.....	85
4.2.1. Visi Kota Bogor.....	86
4.2.2. Misi Kota Bogor	87
4.2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Bogor	4
Gambar 2. Temperatur Udara di Kota Bogor 2014.....	5
Gambar 3. Distribusi persentase PNS di Lingkungan Pemkot Bogor menurut pendidikan Tahun 2017.	6
Gambar 4. Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2015	7
Gambar 5. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2011-2014.	8
Gambar 6. Jumlah Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia di Kota Bogor.....	9
Gambar 7. Jumlah Jumlah Jemaah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor.....	9
Gambar 8. Produksi Sayuran di Kota Bogor Tahun 2013-2014.....	11
Gambar 9. Perkembangan Air Minum Terjual (Juta m3)	12
Gambar 10. Perkembangan Volume Komoditas.	13
Gambar 11. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga.	16
Gambar 12. Keluarga Menurut tahapan Kesejahteraan 2013-2014.....	17
Gambar 13. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus menurut Kecamatan Tahun 2014.	17
Gambar 14. Membangun Kesiapan Menjadi Smart City	66
Gambar 15. Dewan Smart City (model dari IT Governance)	66
Gambar 16. 6 Elemen Smart City	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016	19
Tabel 2. Persentase Tingkat Kualitas RT/RW, Tingkat Kesahihan RT/RW, dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang.	19
Tabel 3. Persentase Perubahan Materi Muatan RT/RW Kota Bogor.....	20
Tabel 4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016....	24
Tabel 5. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Budaya Organisasi.	26
Tabel 6. Hasil Pencapaian Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	28
Tabel 7. Penyampaian Info Kesehatan.	29
Tabel 8. Fasilitasi Pokmas Penerapan PHBS.	29
Tabel 9. Indikator Kinerja PHBS. Sumber:LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016..	30
Tabel 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa di 2016 s.d. Triwulan III Tahun 2017. Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016	35
Tabel 11. Rekap Aspirasi Pengaduan Online 1 Januari S.D 30 Desember 2016	35
Tabel 12. Capaian kinerja Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (RPJMD 2015-2019)	37
Tabel 13. PDRB Sektor Kota Bogor	52

1

ANALISIS MASA DEPAN

1.1 SEJARAH BERDIRINYA KOTA BOGOR

Kota Bogor lahir dari sebuah Kerajaan besar bernama Pajajaran yang memindahkan ibu kotanya ke tanah Pakuan pada tahun 1482 (dari tempat semula, yaitu Galoeh) Seiring dinobatkannya Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi menjadi raja Kerajaan Pajajaran. Perpindahan ibukota ini adalah untuk yang terakhir kalinya karena pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 yang kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi kerajaan besar ini pada akhirnya lenyap. Berakhirlah jaman pajajaran (1482-1579). Hancur dan hilanglah sebuah ibu kota kerajaan yang tersohor namanya. Kota itu dikalahkan tapi tidak untuk dikuasai. Lama kelamaan wilayah ini berganti rupa menjadi hutan belantara. Tidak ada catatan yang tertinggal mengenai Pakuan, ibukota Kerajaan Pajajaran setelah keruntuhannya pada tahun 1579. Seolah hilang dan baru ditemukan kembali setelah serangkaian ekspedisi yang dilakukan oleh Scipio pada tahun 1687, Adolf Winkler tahun 1690 dan Abraham van Riebeeck tahun 1704 dan 1709.

Penemuan Prasasti Batutulis dan situs-situs lainnya menjadi bukti yang meyakinkan bahwa di Bogorlah terletak pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Atas perintah dari Camphuijs, untuk mencari jejak Kerajaan Pajajaran, ekspedisi pada tahun 1687 yang dipimpin Sersan Scipio dibantu oleh Letnan Patinggi dan Letnan Tanuwijaya seorang sunda Sumedang berhasil menemukan pemukiman di beberapa tempat, seperti Cikeas, Citeureup, Kedung Halang dan Parung Angsana. Pada tahun 1687, pembukaan Hutan Pajajaran mengawali babak baru kehidupan tanah ini yang ditandai dengan didirikannya sebuah perkampungan yang kemudian diberi nama Kampung Baru. Kampung Barulah yang selanjutnya menjadi cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor yang didirikan kemudian sekaligus sebagai pusat pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya seperti Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantarjati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng dan Cimahpar.

Pada tahun 1745 Gubernur Jenderal Baron Van Inhoff jatuh cinta pada tanah indah ini dan lalu membangun sebuah istana yang mirip dengan Bleheim Palace di Inggris. Istana yang saat ini tersohor dengan nama Istana Bogor dibangun seiring dengan pembangunan jalan Raya Daendles yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang.

Pada masa pendudukan Inggris, dalam kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Raffles, kota ini berkembang pesat dimana Istana Bogor mengalami renovasi dengan perkembangan taman disekelilingnya yang merupakan cikal bakal Kebun Raya. Beliau juga memperkejakan seorang *Planner*(perencana) yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzorg*. *Buitenzorg* yang berarti "without a care" kemudian tersohor menjadi destinasi wisata pelancong dunia, hingga menjadi *pilgrimage* para ilmuwan dunia setelah lahirnya *S'Lands Plantetuin Te Buitenzorg* (Kebun Raya Bogor). Setelah pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. *Gemeente* Batavia (S. 1903 No.204)
2. *Gemeente* Meester Cornelis (S. 1905 No.206)
3. *Gemeente Buitenzoorg* (S. 1905 No.208)
4. *Gemeente* Bandoeng (S. 1906 No.121)
5. *Gemeente* Cirebon (S. 1905 No.122)
6. *Gemeente* Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)

Pembentukan *Gemeente* tersebut bukan untuk kepentingan penduduk pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi *Burgermeester* (Walikota) dari *Staadsgemeente Buitenzorg* selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau Undang-undang Perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1922 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince* West Java) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18

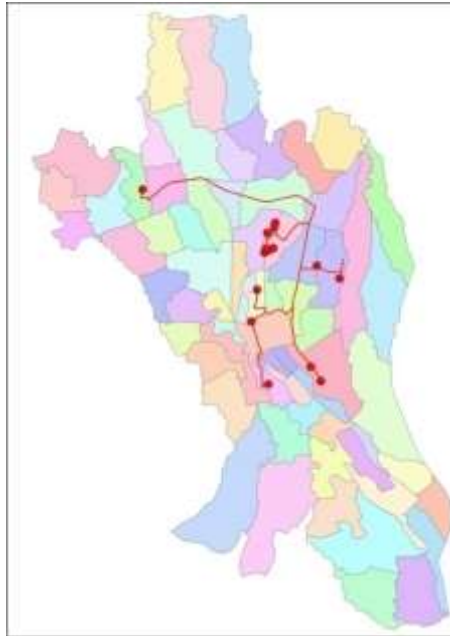
Kabupaten (*Regentscape*) dan Kotapraja (*Staads Gemeente*), dimana *Buitenzorg* (Bogor) salah satu *Staads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368, dengan prinsip desentralisasi modern, dimana kedudukan *Burgermeester* menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah menjadi: Karesidenan menjadi *Syoeoe*, Kabupaten/*Regenschaps* menjadi Ken, Kota/*Staads Gemeente* menjadi Si, Kawedanaan/Distrik menjadi Gun, Kecamatan/Under Districk menjadi Soe dan desa menjadi Koe. Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor. Nama Bogor sendiri dapat ditemui pada sebuah dokumen tertanggal 7 April 1752. Dalam dokumen tersebut tercantum nama Ngabei Raksacandra sebagai "*hoofd van de negorij Bogor*" (kepala kampung Bogor). Dalam tahun tersebut ibukota Kabupaten Bogor masih berkedudukan di Tanah Baru. Dua tahun kemudian, Bupati Demang Wiranata mengajukan permohonan kepada Gubernur Jacob Mossel agar diizinkan mendirikan rumah tempat tinggal di Sukahati di dekat *Buitenzorg*. Terakhir berdasarkan PP No.44/1992, perwakilan kecamatan Tanah Sareal ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008, wilayah Kota Bogor terdapat enam kecamatan dan 68 kelurahan (diolah dari berbagai sumber).

1.2 PERKEMBANGAN KOTA BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

1.2.1 Letak Geografis



Gambar 1. Peta Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 33,9° C dengan suhu terendah 18,8° C dengan suhu tertinggi 36,1° C. Kelembaban udara 90,8 %, Curah hujan rata-rata setiap bulan sekitar 352,5 – 576,1 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Agustus 2014. Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

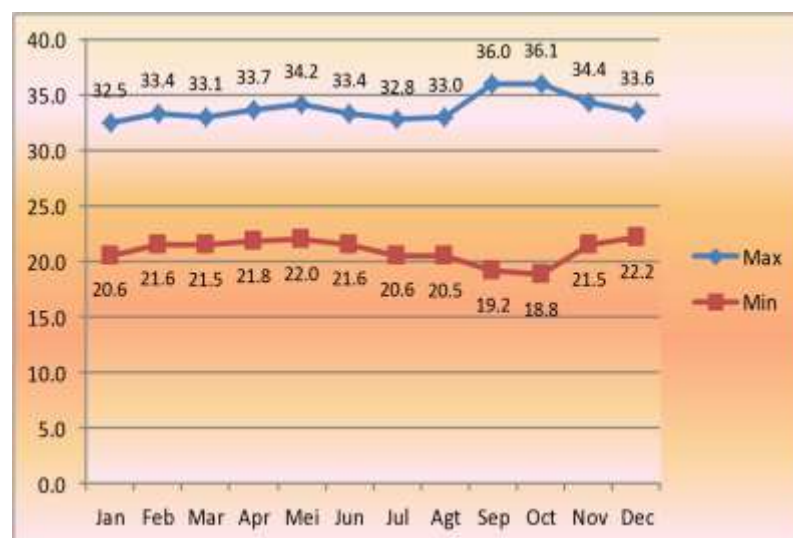
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,9°C, dengan suhu terendah 18,8°C dan suhu tertinggi 36,1°C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

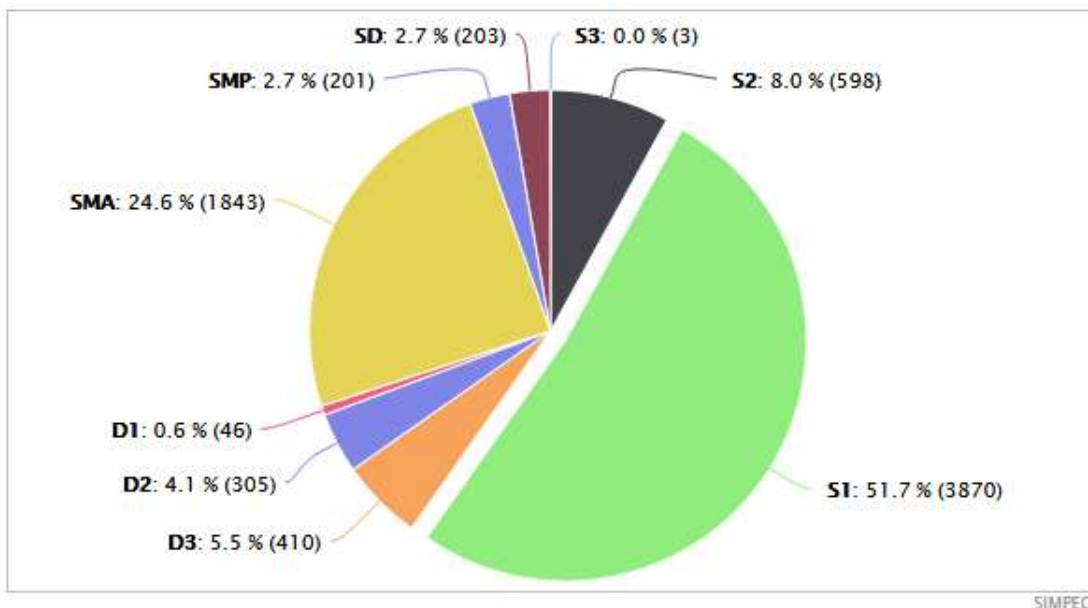
Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri koli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.



Gambar 2. Temperatur Udara di Kota Bogor 2014
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2016

1.2.2 Pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kota Bogor terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan. Sampai dengan tahun 2015 jumlah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Bogor tercatat sebanyak 7.479 orang yang terdiri atas 3.722 laki-laki dan sisanya sebanyak 3.757 perempuan. Pegawai negeri di Kota Bogor menurut golongan gaji terdiri atas golongan I sebanyak 245 orang, golongan II sebanyak 1.662 orang, golongan III sebanyak 3.355 orang dan golongan IV sebanyak 2.215 orang. Sedangkan menurut pendidikan yang ditamatkan, terdapat sebanyak 203 orang berpendidikan Sekolah Dasar, sebanyak 201 orang berpendidikan SLTP, sebanyak 1.843 orang berpendidikan SLTA. Selanjutnya terdapat sebanyak 761 orang berpendidikan Diploma, dan sebanyak 3.870 orang berpendidikan Strata I dan sebanyak 603 orang berpendidikan Strata II/III.



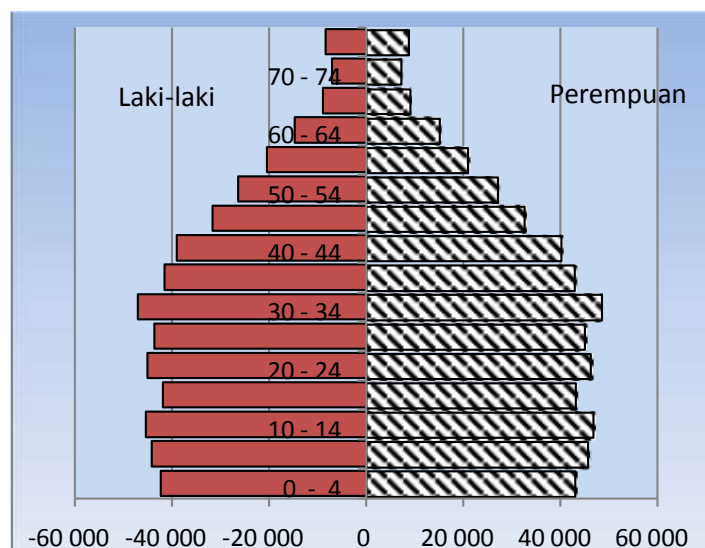
Gambar 3. Distribusi persentase PNS di Lingkungan Pemkot Bogor menurut pendidikan Tahun 2017.
Sumber : Simpeg Kota Bogor

1.2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2016 terdapat sebanyak 1.064.687 orang yang terdiri atas 540.288 orang laki-laki dan sebanyak 524.399 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2016 bertambah sebanyak 16.765 orang atau meningkat sebanyak 1,60%. Dengan luas wilayah 118.50 Km², kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2016 mencapai 8.985 orang per Km². Berdasarkan hasil Survey angkatan kerja nasional, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2015 terdapat sebanyak 780.951 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja sebanyak 450.925 orang termasuk

kedalam kelompok angkatan kerja. Sebanyak 400.983 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya sebanyak 49.942 orang adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan.

Pada umumnya penduduk yang bekerja di Kota Bogor terserap pada lapangan pekerjaan perdagangan dan jasa-jasa. Dengan rincian sebanyak 120.802 orang bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan dan hotel, sedangkan yang bekerja pada lapangan pekerjaan jasa-jasa terdapat sebanyak 119.126 orang. Penduduk yang bekerja di Kota Bogor menurut pendidikan terdapat sebanyak 60.117 berpendidikan SLTP, sebanyak 154.612 orang berpendidikan SLTA dan sebanyak 81.245 orang berpendidikan akademi dan universitas.



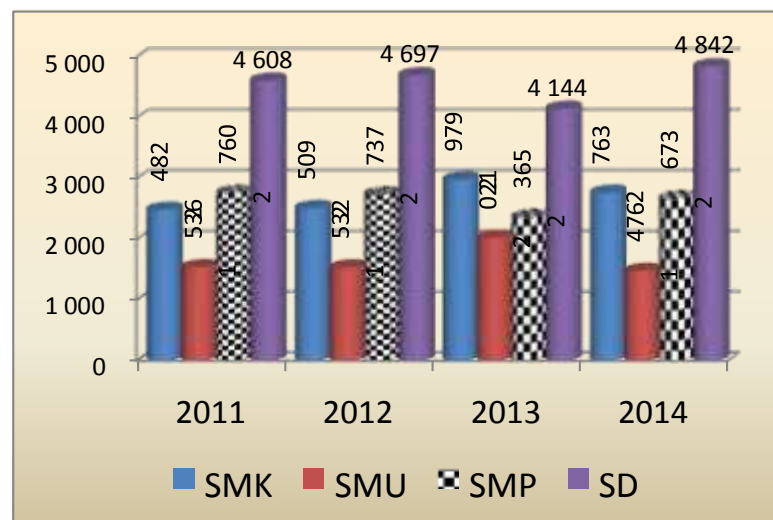
Gambar 4. Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2015
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.2.4 Sosial

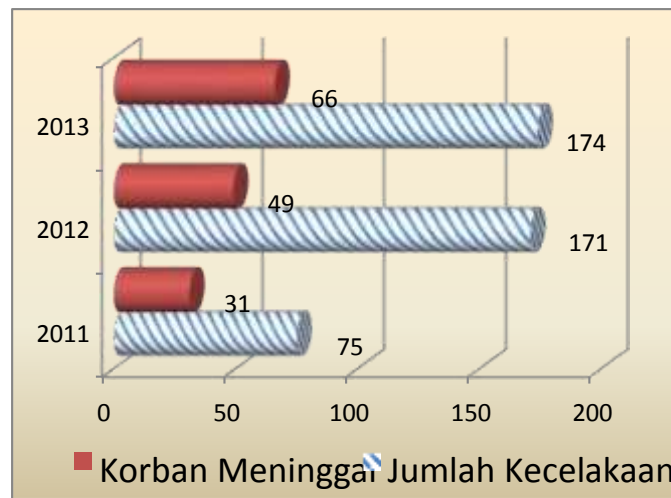
Perkembangan pendidikan di Kota Bogor ditunjukkan dengan adanya beberapa peningkatan baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun oleh Kementerian Agama Kota Bogor. Pada tahun 2016 jumlah sekolah dasar di Kota Bogor terdapat sebanyak 229 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.637 orang dan jumlah murid sebanyak 107.090 orang. Jumlah Sekolah menengah pertama pada tahun 2016 terdapat sebanyak 110 unit dengan jumlah guru sebanyak 2.221 orang dan jumlah murid sebanyak 46.491 orang. Untuk sekolah menengah atas pada tahun 2016 terdapat sebanyak 52 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.247 orang dan jumlah murid sebanyak 19.939 orang. Sedangkan jumlah sekolah menengah kejuruan pada tahun 2016 terdapat sebanyak 96 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.407 orang dan jumlah murid sebanyak 37.312 orang.

Sementara itu, pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Kementerian Agama Kota Bogor pada tahun 2016 terdapat sebanyak 60 unit Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 619 orang dan jumlah murid sebanyak 12.740 orang. Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (Tsanawiyah) pada tahun 2016 terdapat sebanyak 42 unit dengan jumlah guru sebanyak 673 orang dan jumlah murid sebanyak 10.981 orang. Sedangkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (Aliyah) pada tahun 2016 terdapat sebanyak 16 unit dengan jumlah guru sebanyak 322 orang dan jumlah murid sebanyak 3.482 orang.

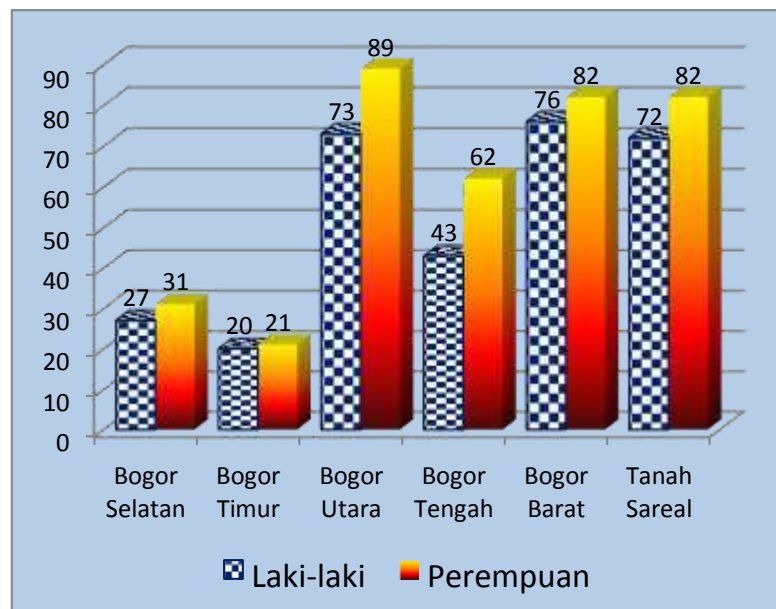
Di bidang kesehatan, jumlah rumahsakit di Kota Bogor pada tahun 2016 terdapat sebanyak 18 unit dan jumlah pusat kesehatan masyarakat sebanyak 24 unit dan jumlah pusat kesehatan masyarakat pembantu sebanyak 32 unit. Jumlah bayi yang diimunisasi pada tahun 2016 pada umumnya lebih rendah dari target yang ditetapkan (19.638 bayi). Sedangkan untuk pelayanan keluarga berencana di Kota Bogor disediakan sebanyak 113 klinik keluarga berencana dan sebanyak 68 orang petugas keluarga berencana yang tersebar di seluruh kelurahan. Jumlah orang yang dapat menunaikan ibadah haji ke tanah Mekah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 681 orang. Dengan komposisi jumlah jemaah terbanyak berasal dari Kecamatan Bogor Barat sebanyak 178 orang, Kecamatan Bogor Utara sebanyak 162 orang dan yang terendah jemaah haji dari Kecamatan Bogor Timur yang hanya 67 orang.



Gambar 5. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2011-2014.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017



Gambar 6. Jumlah Kecelakaan dan Korban Meninggal Dunia di Kota Bogor Tahun 2011-2013.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017



Gambar 7. Jumlah Jumlah Jemaah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bogor.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.2.5 Pertanian

Lahan pertanian di Kota Bogor tahun 2016, sebagian besar berada pada lahan bukan sawah yaitu sebesar 1.648 ha Sementara lahan sawah hanya tercatat tinggal 321 ha, yang sebagian besar ada pada wilayah Kecamatan Bogor Selatan (105 ha), Bogor Barat (155 ha) dan Bogor Timur (57 ha). Lahan sawah di Kota Bogor semuanya sudah menggunakan sistem irigasi setengah teknis yaitu sekitar 293 ha, dengan rincian per kecamatan di wilayah Bogor Barat (152 ha) dan di Bogor Selatan (82 ha). Sementara lahan pertanian bukan sawah di masing-masing kecamatan mempunyai luas yang berimbang yaitu berkisar antara 119 ha sampai dengan 612

ha. Hanya kecamatan Bogor Tengah saja yang mempunyai luas lahan paling kecil yaitu sekitar 22 ha.

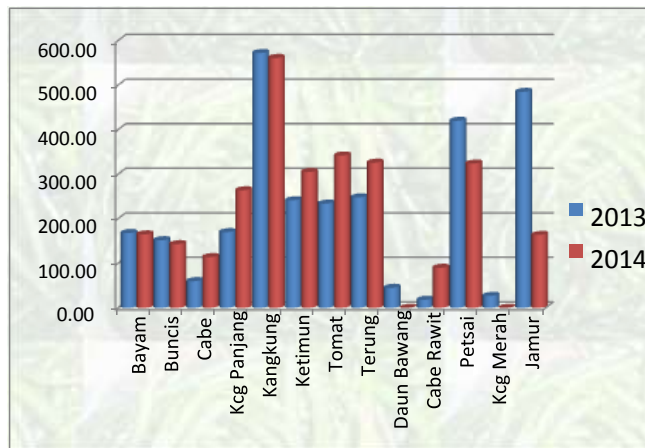
Sebanding dengan luas lahan pertanian yang ada, maka produksi pertanian khususnya padi pada tahun 2016 di Kota Bogor lebih banyak berasal dari tiga kecamatan yaitu Bogor Selatan menyumbangkan 1.434 ton, Bogor Barat 1.807 ton dan Bogor Timur 700 ton. Sisanya dari Kecamatan Bogor Utara 35 ton dan Kecamatan Tanah Sareal 52 ton. Produksi ikan kolam di Kota Bogor tahun 2015 mencapai 4.852 ton, sebagian besar berasal dari budi daya ikan kolam yang dihasilkan oleh Kecamatan Tanah Sareal sebagai penyumbang terbesar yaitu 1.865,33 ton (38,4 % dari total produksi ikan kolam).

Petani ikan kolam air tenang umumnya berada di wilayah Kecamatan Tanah Sareal (325 petani) dan Bogor Selatan (145 petani). Namun luas area kolam terbesar berada di kecamatan Tanah Sareal yaitu sebesar 132.800 m² atau 43,7 persen dari total area kolam se- kota Bogor. Hal ini menyebabkan Tanah Sareal sebagai penghasil ikan terbesar. Untuk produksi tanaman palawija di Kota Bogor, tahun 2016 masih didominasi komoditi ubi kayu yang mencapai 4.440 ton, jagung mencapai 3.774 ton dan talas yang hanya mencapai 1.340 ton.

Tomat merupakan jenis tanaman sayuran yang dihasilkan terbanyak Kota Bogor tahun 2016 yaitu mencapai 1.276 ton, kemudian komoditi terung dan ketimun masing-masing menghasilkan 1.118,22 ton, dan 1.193 ton sedangkan komoditi jamur hanya menghasilkan 88 ton. Jenis buah-buahan, pada tahun 2016 terbanyak adalah buah jambu biji yang mencapai produksi 1.647,8 ton, durian mencapai 1.382,5 ton dan produksi rambutan mencapai 992,7 ton selama tahun 2016. Pada tahun 2015, produksi Jahe mencapai 28,85 ton Sedangkan Komoditi mengkudu pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan produksinya mencapai 237,75 ton sedangkan di tahun 2016 hanya mencapai 60,43 ton.

Demikian pula dengan komoditi lidah buaya yang mencapai produksi sebesar 427,01 ton. Dracaena merupakan tanaman hias yang produksinya cukup tinggi diantara tanaman hias lainnya di Kota Bogor. Pada tahun 2016 Dracaena dengan luas tanam mencapai 2.850 m² dapat menghasilkan produksi sebanyak 28.000 tangkai. Sementara itu tanaman Heliconia E produksinya sebanyak 29.400 tangkai. Populasi Ternak kecil di Kota Bogor tahun 2016 masih didominasi oleh domba yaitu sebanyak 11.539 ekor dan terbanyak berada di Kecamatan Bogor Utara yaitu mencapai 4.391 ekor. Sedangkan untuk ternak besar, didominasi sapi perah sebanyak 854 ekor dan terbanyak berasal dari Kecamatan Tanah Sareal yang mencapai 563 ekor. Produksi daging pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari

3,95 juta Kg daging sapi pada tahun 2015, meningkat menjadi sebanyak 4,13 juta Kg daging sapi pada tahun 2016.



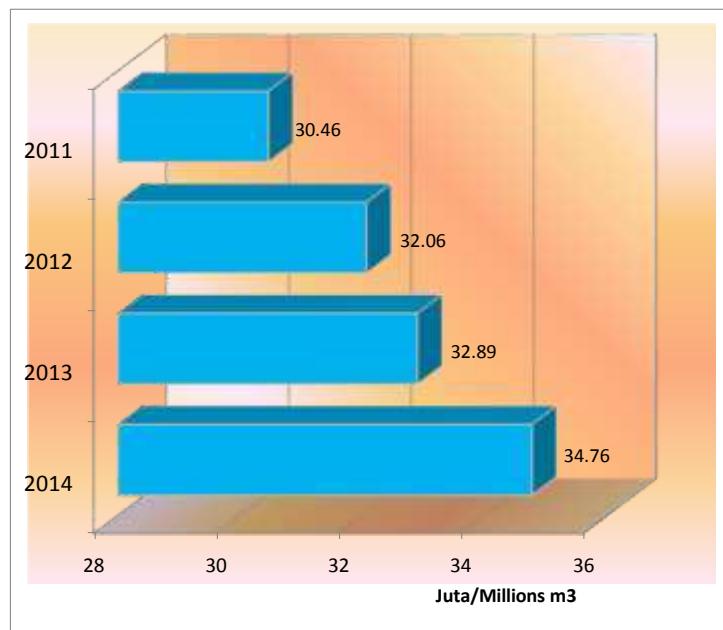
Gambar 8. Produksi Sayuran di Kota Bogor Tahun 2013-2014.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.2.6 Perindustrian dan Perdagangan

Potensi industry Kimia, Agro dan hasil hutan di Kota Bogor pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan jumlah unit usaha mencapai 2.841 unit dan melibatkan tenaga kerja sebanyak 22.870 orang. Nilai investasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 393,54 miliar. Sementara itu industry Logam, Mesin, Elektronika dan aneka pada tahun 2015 terdapat sebanyak 1.215 unit dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 36.290 orang dan investasi sebesar Rp.385,09 miliar. Sumber energi gas semakin diminati masyarakat Kota Bogor. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan pelanggan gas di tahun 2016 yang mencapai 22.690 dari 19.720 pelanggan di tahun 2015 dan sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga yaitu sekitar 22.150 pelanggan.

Pemanfaatan gas di kalangan pelanggan industri dan komersil mengalami penurunan. Penggunaan gas di kalangan industri menurun dari 364.701.822 m³ tahun 2015 menjadi 349.502.165 m³ pada tahun 2016. Sedangkan penggunaan di kalangan pelanggan komersil dari 2.103.534 m³ tahun 2015 menjadi 4.061.205 m³ pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan volume gas yang terjual juga mengalami penurunan dibanding tahun 2015 dengan rata-rata volume gas terjual per bulan selama tahun 2016 sekitar 358,12 juta kubik. Salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok adalah air bersih. Salah satu perusahaan air minum yang menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bogor adalah PDAM Tirta Pakuan. PDAM Tirta Pakuan menyediakan air bersih untuk mencukupi kebutuhan penduduk Kota Bogor sejak tahun 1977. Hingga saat ini, jumlah pelanggannya terus meningkat.

Pada tahun 2016 jumlah pelanggan di Kota Bogor sudah mencapai 147.092 pelanggan yang sebagian besar merupakan pelanggan rumah tangga. Pelanggan PDAM kedua yang terbesar adalah dari kelompok Niaga. Banyaknya air yang disalurkan PDAM Tirta Pakuan selama tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 air yang disalurkan mencapai 38,15 juta m³, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 37,28 juta m³. Nilai air yang terjual pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari 173,86 miliar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 178,27 miliar rupiah pada tahun 2016.



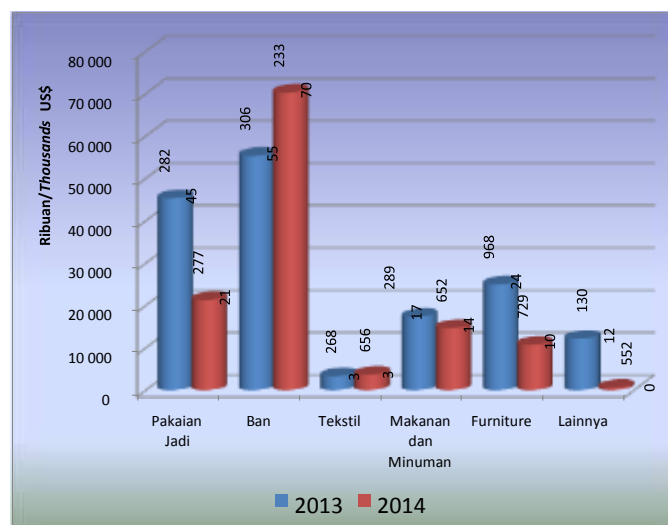
Gambar 9. Perkembangan Air Minum Terjual (Juta m³)
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.2.7 Perdagangan

Kota Bogor yang merupakan salah satu kota yang terus mengalami kemajuan memposisikan Sektor perdagangan menjadi salah sektor ekonomi andalan di daerah ini. Jumlah perusahaan perdagangan formal pada tahun 2016 sebanyak 654 perusahaan. Dari seluruh perusahaan yang ada terdapat 11 perusahaan besar (dengan investasi di atas 5 miliar rupiah), 87 unit perusahaan menengah (investasi 500 juta hingga 5 miliar rupiah) dan 371 unit perusahaan kecil dengan investasi 50 juta hingga 500 juta rupiah. Sedangkan perusahaan mikro terdapat sebanyak 185 unit usaha. Sementara itu, guna pelaksanaan transaksi jual beli di pasar, di Kota Bogor terdapat sebanyak 7 pasar yang mengelola sebanyak 6.144 kios dan los.

Pada tahun 2015 perdagangan melalui ekspor barang dan jasa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi ekspor non migas pada

tahun 2014 tercatat sebesar 121,10 juta US\$ dan pada tahun 2015 menurun menjadi sekitar 106,08 juta US\$ atau mengalami penurunan sekitar -12,4 % dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2014. Komposisi ekspor non migas pada tahun 2015 masih didominasi oleh komoditas pakaian jadi dan ban kendaraan bermotor. Nilai ekspor pakaian jadi sebesar 16,5 juta US\$ dan ban kendaraan bermotor sebesar 67,7 juta US\$. Sedangkan nilai ekspor barangbarang furniture selama tahun 2015 hanya mencapai 2,9 juta US\$ selanjutnya nilai ekspor makanan dan minuman mencapai 12,6 juta US\$ dan nilai ekspor tekstil hanya mencapai 3,9 juta US\$.



Gambar 10. Perkembangan Volume Komoditas.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.2.8 Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata

Hampir semua jalan di wilayah Kota Bogor sudah diaspal. Hingga tahun 2016, panjang jalan yang sudah diaspal mencapai 90,69 persen. Jalan beton hanya sekitar 2,10 persen dan sisanya masih kerikil dan tanah. Jalan dengan kondisi baik mencapai 47,40 persen, kondisi sedang mencapai 40,79 persen dan sisanya 11,81 persen dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Jumlah penumpang kereta api melalui Stasiun Bogor selama tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Selama tahun 2016 jumlah penumpang yang menggunakan transportasi Kereta Api Commuter line dari Kota Bogor tercatat sebanyak 16.738.517 yang terdiri atas 8.234.453 menggunakan tiket harian berjaminan, sebanyak 6.635.429 menggunakan tiket multi trip dan yang menggunakan kartu elektronik money sebanyak 1.868.635 penumpang. Jumlah kendaraan bermotor yang mutasi masuk di Kota Bogor tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yakni dari 187 unit pada tahun 2015 menjadi 153 unit pada tahun 2016.

Jumlah surat yang dikirim lewat pos pada kantor pos pada tahun 2015 secara umum mengalami penurunan dibanding tahun 2014 terutama jenis surat biasa yang mengalami kenaikan cukup tinggi dari 147.180 pada tahun 2014 menjadi 111.969 pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenis surat lainnya seperti pos ekspres, kilat khusus dan paket pos selama tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 2014 jenis surat kilat khusus mencapai 347.246 dan pada tahun 2015 turun menjadi sebanyak 326.915. Selanjutnya pos ekspres pada tahun 2014 mencapai 124.520 sedangkan pada tahun 2015 hanya 66.560 sedangkan paket pos pada tahun 2012 mencapai 26.830 sedangkan pada tahun 2015 hanya 16.032. Jumlah transaksi penerimaan wesel yang terjadi di kantor pos se Kota Bogor pada tahun 2015 mengalami penurunan begitu pula transaksi wesel pembayaran kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2014 transaksi wesel penerimaan mencapai 49,23 miliar rupiah sedangkan untuk transaksi wesel pembayaran kembali mencapai 27,54 miliar rupiah. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dimana transaksi wesel penerimaan hanya mencapai 39,12 miliar rupiah sedangkan untuk transaksi wesel pembayaran kembali mencapai 23,11 miliar rupiah.

Kebun Raya Bogor merupakan salah satu objek pariwisata di Kota Bogor yang banyak diminati baik wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung ke Kebun Raya Bogor mencapai 1.532.666 orang dengan hasil penjualan karcis terjual mencapai 19,98 miliar rupiah. Pengunjung Kebun Raya Bogor yang terbanyak terjadi pada bulan Agustus 2016. Sampai saat ini, ada sekitar 16 objek wisata terdapat di Kota Bogor. Objek wisata *Kebun Raya* pada tahun 2016 dikunjungi oleh 1.532.666 pengunjung yang merupakan pengunjung terbesar ke objek wisata di Kota Bogor. Sedangkan wisatawan yang berkunjung ke objek *The Jungle* dan *Jungle Fest* pada tahun 2016 masing-masing dikunjungi oleh 321.369 pengunjung dan 121.338 pengunjung.

1.2.9 Keuangan dan Harga-harga

Realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,61% dibanding tahun 2015. Penyebab utamanya adalah terjadinya kenaikan Pendapatan Pajak Daerah yang peranannya paling besar terhadap PAD juga mengalami peningkatan sebesar 12,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar 53,11% dengan kenaikan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai 349,13 miliar rupiah. Pendapatan dari DAU masih merupakan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan Pemkot Bogor tahun 2016. Realisasi pengeluaran Pemerintah Kota Bogor tahun 2016 sebesar 2,34 triliun rupiah, atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 25,76%.

Pengeluaran terbesar adalah untuk belanja pegawai yaitu 44,43% dari total pengeluaran.

Belanja pegawai pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 31,32% dibandingkan dengan belanja pegawai tahun 2015. Inflasi tahun kalender 2016 Kota Bogor secara umum mencapai 4,93%. Inflasi tertinggi tahun sebelumnya terjadi pada kelompok pengeluaran transport dan komunikasi yaitu mencapai 12,77%. Di Tahun 2016 inflasi tertinggi dari kelompok kesehatan sebesar 8,96%, kedua dari bahan makanan sebesar 7,16%, ketiga dari kelompok makanan sebesar 4,29% dan terakhir dari kelompok perumahan sebesar 3,64%. Rata-rata inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari 2016 mencapai 0,88%.

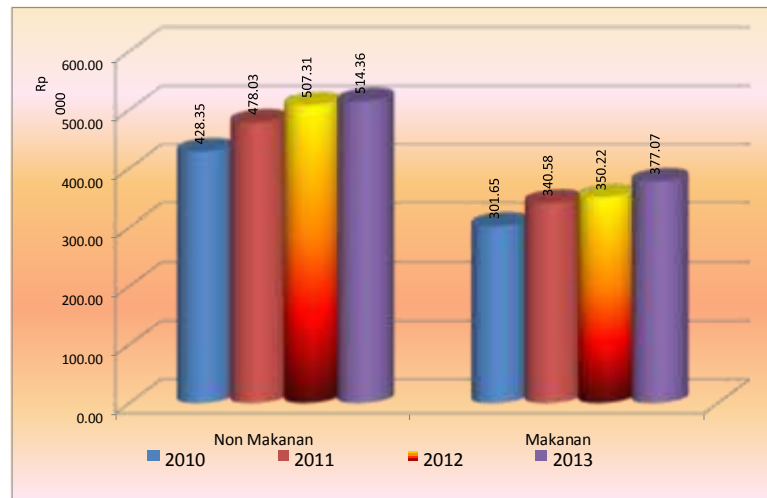
Jumlah Bank di Kota Bogor sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 50 Bank dengan 152 kantor Kas. Jumlah aktiva rupiah Bank Umum di Kota Bogor terus mengalami peningkatan setiap bulan. Jumlah aktiva pada Bank Konvensional di Bulan Desember 2016 mencapai 49,48 triliun rupiah dan pada Bank Syariah mencapai 4,03 triliun. Posisi kredit perbankan tahun 2016 mencapai 16 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 5,09 % dibanding tahun 2015. Terbanyak berasal dari kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyak 3,11 triliun atau 19,44%. Posisi kredit pada tahun 2016 paling banyak diberikan Bank Umum kepada skala usaha menengah yaitu sekitar 60,69% dengan 45,23 % digunakan sebagai modal kerja. Disamping itu, posisi pinjaman dalam bentuk rupiah dan valuta asing (Valas) tahun 2016 mencapai 4,38 triliun rupiah yang terdistribusi untuk modal kerja sebesar 2,05 triliun rupiah, investasi sebesar 1,12 triliun rupiah dan keperluan konsumsi sebesar 1,2 triliun rupiah..

Posisi pinjaman untuk usaha mencapai 2,89 triliun rupiah dan sisanya bukan untuk usaha sebesar 1,10 triliun rupiah. Posisi pinjaman untuk rumah tinggal pada tahun 2015 mencapai 326,25 miliar rupiah dan pinjaman kendaraan bermotor 120,56 miliar rupiah. Sedangkan posisi simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR tahun 2016 dalam bentuk giro sebesar 1,12 triliun rupiah, dalam bentuk tabungan sebesar 1,57 triliun rupiah dan dalam bentuk deposito sebesar 2,21 triliun rupiah.

1.2.10 Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat di tinjau dari segi pendapatannya. Namun karna data pendapatan sulit diperoleh maka tingkat kesejahteraan masyarakat didekati dari sisi pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan hasil SUSENAS 2015, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di Kota Bogor tahun 2015 adalah Rp. 499.115,-. untuk kelompok barang makanan dan sebesar Rp. 825.871,- untuk kelompok barang non makanan.

Jika melihat perkembangan dari tahun ketahun, pengeluaran rata-rata perkapita untuk kelompok barang makanan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 26,64% dibanding tahun 2014. Sementara untuk pengeluaran rata-rata perkapita kelompok barang non makanan meningkat 68,75 % dibanding tahun 2014.



Gambar 11. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

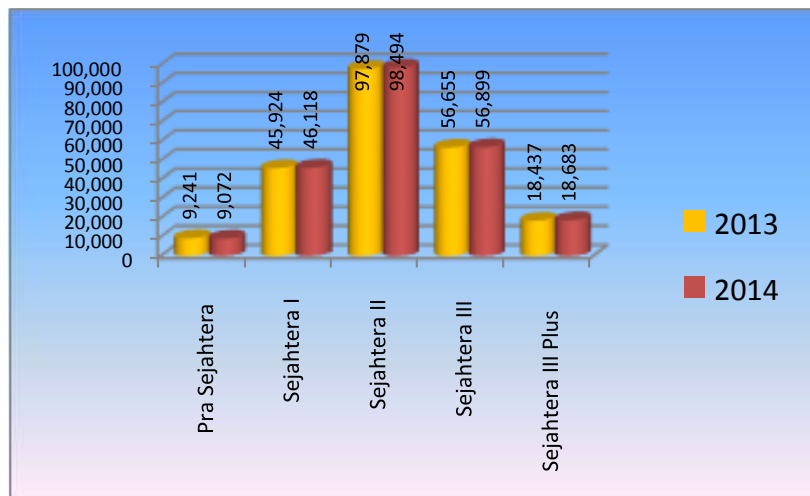
1.2.11 Pendapatan Regional

Secara umum perkembangan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor tahun 2015 adalah sebesar 6,13% . Struktur ekonomi di Kota Bogor tahun 2015 masih tetap di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 21,91%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 18,54%.

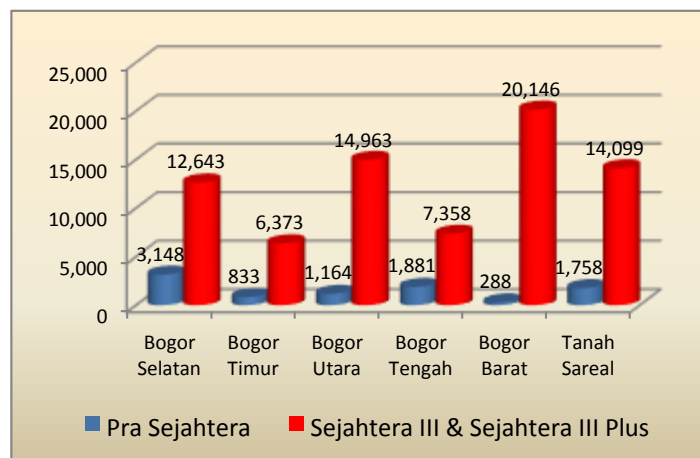
Sedangkan sektor pertanian merupakan kontributor terendah dengan sumbangan sebesar 0,78%. Pada tahun 2015 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bogor sebesar Rp. 32,36 triliun dan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 25,29 triliun.

1.2.12 Kemiskinan

Pada Tahun 2015 menurut tahapan kesejahteraan, penduduk Kota Bogor banyak yang berada pada tahapan keluarga sejahtera II yaitu sebanyak 98.774 keluarga, diikuti kelompok keluarga sejahtera III sebanyak 57.072 keluarga . Sama seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, Kota Bogor juga masih bergelut dengan masalah kemiskinan. Penduduk miskin Kota Bogor pada tahun 2013 sebanyak 83,3 ribu orang dengan persentase sebesar 8,19 persen. Garis kemiskinan di Kota Bogor tahun 2013 adalah Rp 360.518,-



Gambar 12. Keluarga Menurut tahapan Kesejahteraan 2013-2014.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017



Gambar 13. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus menurut Kecamatan Tahun 2014.
Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2017

1.3 ANALISIS KONDISI MASA DEPAN

1.3.1 Analisis Tren / Perkembangan Kota

Teori Konsentris (E.W. Burgess) pada tahap awal pembangunan Kota Bogor setelah adanya pemekaran wilayah di tahun 1995 dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam mengukur bagaimana perkembangan Kota Bogor. Kota Bogor sebagai kota besar pada dasarnya mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua bagian-bagiannya. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar.

Oleh karena semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis, dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. Namun, secara gradual perkembangan tata ruang Kota Bogor yang mempengaruhi perkembangan budaya, ekonomi, social, interaksi faktor-faktor peubah lain yang ada dalam masyarakat

tidaklah demikian. Perkembangan bertumbuh tidak dalam bentuk berlapi. Perkembangan didesain sedemikian rupa dengan sistem dispersi merata dimana pusat kegiatan dan pusat layanan publik dibagi dalam 6 wilayah pelayanan.

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Diswasbangkim). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019, urusan ini dijabarkan menjadi 5 (lima) program, yaitu Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana serta Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Rincian program yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yakni tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan RPJMD 2015-2019, program ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yakni terdiri dari jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan kawasan yang disusun, rencana rinci pengembangan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor dan presentase keterlaksanaan perencanaan tata ruang. Adapun target dan capaian indikator kinerja program berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan kawasan yang disusun	6	1	17%
	Rencana rinci pengembangan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor	Ada	Ada	100%
	Persentase keterlaksanaan perencanaan tata ruang (%)	40%	40%	100%

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor dengan maksud untuk melaksanakan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031. Tujuan kegiatan ini adalah menilai kinerja RTRW Kota Bogor sebagai dasar untuk dilakukannya revisi RTRW.

Peninjauan kembali ini merupakan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Pertimbangan peninjauan kembali RTRW didasarkan atas berkembangnya dinamika pembangunan Kota Bogor selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak disusunnya RTRW. Adapun output kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Evaluasi RT/RW Kota Bogor 2011-2031, dengan hasil evaluasi sebagai berikut ini.

Tabel 2. Persentase Tingkat Kualitas RT/RW, Tingkat Kesahihan RT/RW, dan Tingkat Permasalahan Pemanfaatan Ruang.

No	Objek	Variabel	Penilaian		Keterangan
1	Kualitas RT/RW	Kelengkapan muatan RT/RW tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang rencana struktur ruang wilayah rencana pola ruang wilayah penetapan kawasan strategis arahan pemanfaatan ruang arahan pengendalian pemanfaatan ruang	25%	Lengkap	RT/RW Kota Bogor sudah mengacu pada pedoman no 17/PRT/M/2009 Terdapat perubahan dinamika eksternal yang
		Kedalaman pengaturan muatan RTRW mengacu pada permen PU no 17/PRT/M/2009	25%	Sesuai dengan pedoman	mempengaruhi perkembangan kota bogor dan
		Kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah	25%	Sesuai dengan pedoman	belum diantisipasi dalam RT/RW

No	Objek	Variabel	Penilaian		Keterangan
		Kesesuaian antara RT/RW dan dinamika pembangunan yang berkembang	20%	Sesuai dengan pedoman	
2	Kesahihan RTRW	Kesesuaian dengan peraturan perundangan yang terkait	80%	Sesuai	Dalam pelaksanaan RT/RW 5 tahun pertama terdapat perubahan peraturan sektoral yang berpengaruh terhadap RT/RW
3	Simpangan pemanfaatan Ruang	Kesesuaian antara RT/RW dan pemanfaatan ruang di lapangan	84%	Sesuai	Simpangan pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan muatan RT/RW (tabel 7.2)

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Tabel 3. Persentase Perubahan Materi Muatan RTRW Kota Bogor.

No	Materi Muatan		Bobot Maksimum	Penilaian Kinerja	Perubahan	Keterangan
1.	Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang		15%	15%	0%	Tidak berubah
2.	Rencana Struktur Ruang Wilayah		20%	17%	2%	
	2.1	Sistem Pusat Permukiman	5%	5%	0%	WP tidak berubah, perlu ada penyesuaian kembali waktu pencapaian WP
	2.2	Sistem Jaringan	15%	13%	2%	Adanya



No	Materi Muatan		Bobot Maksimum	Penilaian Kinerja	Perubahan	Keterangan
	.	Prasarana				kebijakan baru terkait transportasi, rencana jaringan jalan baru terlaksana sebagian dan perubahan rencana pelayanan infrastruktur sektoral
3.	Rencana Pola Ruang Wilayah		40%	25%	7%	
	3.1	Kawasan Lindung	15%	10%	2%	Terdapat beberapa data baru yang lebih akurat, dan penyesuaian waktu pelaksanaan
	3.2	Kawasan Budi Daya	25%	20%	5%	Kebutuhan pola ruang guna campuran, perdagangan dan jasa
4.	Penetapan Kawasan Strategis		5%	5%	0	Tidak ada perubahan
5.	Arahan Pemanfaatan Ruang		10%	5%	5%	
	5.1	Perwujudan Rencana Struktur Ruang	5%	3%	2%	Target terlaksana sebagian, karena adanya kendala
	5.2	Perwujudan	5%	3%	2%	Target

No	Materi Muatan	Bobot Maksimum	Penilaian Kinerja	Perubahan	Keterangan
.	Rencana Pola Ruang				terlaksana sebagian karena adanya kendala
5.3	Perwujudan Kawasan Strategis	5	4%	1%	Target terlaksana sebagian, karena adanya kendala
6.	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5%	5%	0	Tidak berubah, namun perlu didetilkan
	TOTAL	100%	86%	14%	

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, perubahan/simpangan materi muatan RT/RW Kota Bogor adalah sebesar 14% yang berarti pada tahun 2017 perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, namun demikian jangka waktu rencana tidak berubah yakni sampai tahun 2031. Adapun rekomendasi perubahan muatan materi RT/RW berdasarkan hasil penilaian diatas adalah sebagai berikut :

a) Rencana Struktur Ruang :

- Pemantapan pusat-pusat permukiman berdasarkan masukan dari penyusunan RDTR 5 WP Kota Bogor
- Penyesuaian rencana struktur ruang terhadap perubahan dan penambahan pusat aktifitas baru berupa integrasi jaringan prasarana tanpa mengubah sistem pusat permukiman

b) Rencana Pola Ruang :

- Penyesuaian pola ruang berdasarkan koreksi peta hasil FGD dan hasil analisis penentuan kuota RTH per WP
- Integrasi arahan pola ruang berdasarkan rencana sektoral yang disusun setelah RT/RW ditetapkan

c) Arahan pemanfaatan Ruang :

- Penyusunan secara lebih rinci indikasi program 5 tahun kedua dengan mempertimbangkan indikasi program yang belum berjalan pada 5 tahun pertama

- Sinkronisasi program sektoral dengan dinas-dinas terkait yang menyangkut tahapan pelaksanaan dan jenis program

2) Penyusunan Rencana Infrastruktur Kawasan Stasiun Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dengan mempertimbangkan bahwa Kawasan Stasiun Bogor merupakan Kawasan Penyangga Kebun Raya dan Istana Bogor. Tujuan kegiatan ini adalah menata Kawasan Stasiun Bogor melalui perencanaan kebutuhan infrastruktur pendukung.

Adapun dokumen yang dihasilkan adalah dokumen rencana infrastruktur terdiri dari pra desain berikut rencana program dan kegiatan yang dibutuhkan. Infrastruktur yang dibutuhkan meliputi : pedestrian pada seluruh jalan di kawasan, Taman Topi menjadi ruang terbuka hijau, pengaturan parkir *on* dan *off street*, pengaturan PKL, konektivitas antar kawasan berupa *underpass* orang dan jembatan penyeberangan orang. Berdasarkan Tabel pencapaian indikator kinerja di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya target tercapai kecuali rencana rinci tata ruang atau kawasan, dikarenakan pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi RT/RW.

a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran RPJMD yakni meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang. Berdasarkan RPJMD 2015-2019, program ini memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja yakni presentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, persentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan dilapangan, persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin, persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang, persentase jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali), tingkat kesesuaian antara PSU dengan perizinan serta jumlah PSU yang diserahkan pengembang. Adapun target dan capaian indikator kinerja program berikut realisasi kegiatan pendukungnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	Presentase keterlaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	40	40	100%
	Kesesuaian antara IMB dengan bangunan dilapangan (%)	92	99,37 %	100,8%
	Pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	74	75.69 %	100,2%
	Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	100%	100%
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)	2		
	Tingkat kesesuaian antara PSU dengan perizinan	100	100	100%
	Jumlah PSU yang diserahkan pengembang	3	2	66%

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja tersebut diatas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Penataan Ruang ini adalah untuk memfasilitasi koordinasi penataan ruang di Kota Bogor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bogor yang beranggotakan pimpinan daerah dan OPD terkait penataan ruang di Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat koordinasi yang membahas masalah perencanaan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang yang menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan. Pada tahun 2016 topik bahasan rapat BKPRD meliputi :

- a) Rencana pembangunan Olympic City
- b) Perizinan klinik
- c) Pengawasan bangunan
- d) Pembangunan rumah sakit geriatri
- e) Sosialisasi revisi RT/RW

- f) Pembangunan Mall dan Rumah Sakit eks Pangrango Plaza
- g) Pembangunan pertokoan Jl. Empang
- h) Izin Usaha Toko Modern
- i) Relokasi pembebasan lahan Jl Tol Bocimi
- j) Alih fungsi Restoran menjadi Condotel
- k) Pembangunan rusunawa
- l) Pembangunan STIE GICI
- m) Perluasan Kampus Akademi Kimia Analis
- n) Pembangunan Mesjid Imam Ahmad Bin Hamdal
- o) Perubahan Fungsi sebagian Ruko menjadi Hotel (Jl. Pangeran Sogiri)
- p) Pembangunan Hotel & Resort (ex. Bostinco)
- q) Pembangunan Kios / Pertokoan di Kawasan Aset PT. KAI
- r) Pembangunan Rumah Kost
- s) Perpanjangan Perizinan PAUD Formal
- t) Pembangunan Rumah Sakit di Jl. Ahmad Yani
- u) Rencana Pembangunan Apartemen di Jl. Salak

Dari ke-21 topik tersebut, pada umumnya membahas terkait aturan zonasi untuk usulan kegiatan, mengingat saat ini RT/RW Kota Bogor bukan alat pengendali pemanfaatan ruang sehingga tidak memuat aturan zonasi. Aturan zonasi masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, yang pengesahannya setelah pengesahan Peraturan Daerah Revisi RT/RW yang akan dilaksanakan tahun 2017. Sehingga saat ini diperlukan aturan transisi terkait peraturan zonasi dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada kegiatan ini pula dilaksanakan koordinasi terkait program Kota Pusaka khususnya memfasilitasi koordinasi pembangunan Lawang Suryakecana dan Tepas Salapan Lawang Dasakreta, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tepas Salapan Lawang Dasakreta yang terletak di sebelah Tugu Kujang diresmikan oleh Bapak Walikota Bogor dan Bapak Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 7 Desember 2016. Kedua tegaran baru Kota Bogor ini telah menjadi obyek wisata baru Kota Bogor, selain sebagai penanda Kawasan Pusaka Kota Bogor.

2) Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Tahap III (SIP3R)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. SIP3R ini merupakan alat bantu mengintegrasikan tugas antar OPD terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari peraturan zonasi, perijinan, pengawasan dan penindakan. Tujuan untuk kegiatan ini adalah mengelola dan memelihara baik perangkat lunak maupun perangkat keras SIP3R. Pada kegiatan ini dilaksanakan pemeliharaan server, testing kehandalan koneksi sistem, integrasi dan interoperabilitas SIP3R dengan sistem informasi perijinan SMART BPPTPM dan pelatihan pagi OPD pengguna yakni Bappeda, BPPTPM, Diswabangkim dan Satpol PP.

Adapun hasilnya adalah terpeliharanya perangkat lunak dan keras SIP3R, serta terhubungnya SIP3R dengan SMART serta terlatihnya OPD pengguna. Dengan terhubungnya kedua aplikasi ini, tercipta satu data obyek perijinan dan tahun 2017 aplikasi ini siap untuk digunakan.

1.3.2 Analisis Prilaku dan Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Budaya Organisasi Pemerintah Merupakan program kerja yang mendukung sasaran tercapainya perilaku SDM yang berintegritas, fokus pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi, sebagaimana terlampir dalam dibawah ini :

Tabel 5. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Budaya Organisasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Tercapainya Perilaku SDM yang berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.	Persentase SDM yang mencapai Nilai KPI Baik	80%	97,6%	122%

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Realisasi Persentase SDM yang mencapai Nilai KPI Baik di RSUD Kota Bogor tahun 2016 adalah **97,6%** atau terealisasi **122%** dari target **80%**. Sedangkan berdasarkan penilaian dari 3 Lembaga independen, Badan Pendapatan Daerah Kota

Bogor di tahun 2016 memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat/konsumen sebesar 93%.

Dalam menunjang Capaian Sasaran Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bogor.

Mentoring Penanganan Perilaku Merugikan Siswa dan Masyarakat Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa, melibatkan berbagai unsur internal dan eksternal Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang terbagi menjadi 3 bentuk kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Rakor Satgas dan Sekolah yang melibatkan Satgas Pelajar Kota Bogor, Satgas Internal Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dari beberapa di sekolah yang berpotensi terjadi penyimpangan perilaku siswa di Sekolah ataupun di luar sekolah.
- b) Operasi SATGAS bulanan dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran antar pelajar.
- c) Mentoring SATGAS Internal di Sekolah yaitu merupakan bentuk pemantauan dan pembinaan oleh Sekolah terhadap siswa-siswa yang terindikasi akan melakukan penyimpangan perilaku. Dengan adanya mentoring internal ini diharapkan dapat meminimalisir dan menghilangkan kebiasaan buruk siswa tentang penyimpangan pelajar seperti tawuran antar pelajar.

Hasil Operasi Satgas Pelajar Kota Bogor yang dilaksanakan setiap bulan sekali, diantaranya dapat mencegah terjadinya tawuran, mendapati anak-anak yang membawa senjata tajam dan berpotensi tawuran serta melakukan pengawalan terhadap kegiatan yang melibatkan pelajar dalam suatu keramaian. Tindak lanjut, hasil dari kegiatan mentoring penanganan penyimpangan perilaku siswa adalah :

- a. memberi pembinaan kepada siswa baik di sekolah oleh guru BK/Waka Kesiswaan/ Pembina OSIS
- b. memberikan pembinaan kepada anak yang tertangkap tangan melakukan atau berencana akan melakukan penyimpangan perilaku (tawuran) oleh Satgas.
- c. berkoordinasi dengan pihak keamanan /kepolisian dalam menangani penyimpangan yang sudah menyinggung ranah hukum.

Perilaku masyarakat yang menyimpang yang menimbulkan kerentanan dan resiko tinggi akan penularan penyakit HIV/AIDS juga mendapatkan perhatian dan intervensi secara serius dari pemerintah. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit HIV yang dilakukan selama tahun 2016 untuk mendukung program tersebut melibatkan peningkatan pengetahuan remaja kota Bogor tentang Konseling Perubahan Perilaku, Peningkatan Kemampuan Tim HIV Puskesmas satelit & RS Rujukan di Kota Bogor dalam menangani pasien ODHA secara komprehensif berkesinambungan, peningkatan kemampuan tokoh agama (Kristen, Hindu, Budha & Islam) dalam melakukan konseling pada Calon pengantin di Kota Bogor dan Monitoring dan evaluasi jejaring penanganan HIV di Kota Bogor melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, KPA dan LSM HIV di Kota Bogor.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS di masyarakat dilakukan kegiatan penyuluhan komprehensif pada anak sekolah menengah atas dan universitas di Kota Bogor, terutama pada kelompok usia 15 – 24 tahun, pada tahun 2016 dilakukan di 131 sekolah, dengan jumlah minimal anak sekolah 100 orang / sekolah, 1500 siswa.

Tabel 6. Hasil Pencapaian Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS Tahun 2014 – 2016.

NO	URAIAN	TAHUN	
		2015	2016
1.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,29 %	0,36 %
2.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15 – 49 tahun	0,46 %	0,63 %
3.	Presentase Konseling dan Test HIV (VCT/PITC)	16,34 %	48,70 %
4.	Persentasi ibu hamil positif HIV dari total ibu hamil yang di test HIV	0,52 %	0,31 %
5.	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi	81,4 %	85,00 %
6.	Presentase populasi perempuan usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	55 %	84,56 %
7.	Presentase populasi laki-laki usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	55 %	84,56 %
8.	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	40,10 %	48,91 %

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Promosi kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terus menerus menjadi agenda rutin, mengingat derajat kesehatan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan kebahagiaan manusia.

Tabel 7. Penyampaian Info Kesehatan.

No	Uraian	Tahun		Media	Respon Masyarakat
		2015	2016		
1	Penyampaian infokes melalui media cetak (koran) dan liputan kegiatan	24 kali	36 kali	HU. Radar Bogor HU. Metropolitan	Masyarakat Kota Bogor sangat responsif terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk pada setiap sesi talkshow di Radio baik langsung (melalui telp) ataupun melalui sms.
2	Penyampaian infokes melalui media elektronik/online (radio)	110 kali	110 kali	Radio sipatahunan, Radio RRI, KISI, Lesmana, Sheba, Elfes, Megaswara, Fajri	

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Tabel 8. Fasilitasi Pokmas Penerapan PHBS.

No	LSM/Komunitas	Sasaran Pembinaan	Jumlah (or)	Tema
1	LSM AMAR+LANSKIP	Masyarakat	40	Komunitas warga tanpa rokok (KWTR)
2	LSM NoTC	Pemilik warung/toko kelontong/sembako	40	Larangan iklan/reklame/promosi rokok di Kota Bogor (Perda Kota Bogor No. 1/2015)
3	KAMMI Kota Bogor	Mahasiswa	40	Narkoba di kalangan remaja/mahasiswa
4	PGI/Gereja Katedral	Jemaat Gereja Katedral	40	PHBS Tatanan Tempat Ibadah, P2M dan PTM
5	Aliansi Perempuan Kota Bogor	Anggota Aliansi	40	Wanita tanpa rokok
6	Karang Taruna Kota Bogor	Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan	40	Pencegahan DBD dengan PSN dan Jumantik RT
		Jumlah	240	

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Selain kegiatan yang digambarkan di atas, intervensi pemerintah dalam mempromosikan perilaku masyarakat dilakukan secara sinergis dan simultan dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat dari mulai tingkat rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan hingga kecamatan. Pencapaian 10 indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga Kota Bogor Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja PHBS.

No	Indikator PHBS	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	91,3	90,6	90,7
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	61,1	69,1	70,0
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	90,6	90,0	92,4
4	Menggunakan air bersih	95,9	97,3	97,4
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	93,7	93,5	93,8
6	Menggunakan jamban sehat	84,5	82,6	83,0
7	Memberantas jentik nyamuk	93,7	94,5	94,6
8	Makan sayur dan buah setiap hari	92,4	92,2	92,9
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	92,8	92,9	93,0
10	Tidak merokok di dalam rumah	62,9	63,0	63,1

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

1.3.2.1 Perilaku Aparatur, Masyarakat dan Swasta Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan dunia teknologi telekomunikasi dan informatika saat ini sudah semakin berkembang. Teknologi yang dipasarkan oleh produsen sangat berbeda jauh dengan teknologi telekomunikasi dan informatika pada tahap awal perkembangannya di tahun 1990an. Penggunaan komputer jinjing (laptop, notebook, all in one, ipad) dan telepon genggam cerdas (smartphone) tidak hanya terbatas di kalangan orang dewasa, namun juga telah lumrah digunakan oleh anak-anak mulai usia 3 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil penelitian Yani Nurhadryani Ph.D (FMIPA IPB, 2016) ditemukan bahwa 76% masyarakat Bogor memiliki smartphone dengan koneksitas internet dan secara aktif mengakses aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook dan Line. Dari jumlah tersebut sebesar 44% secara aktif memanfaatkan smartphonanya untuk transaksi elektronik yang berbasis surat elektronik (*email*), sedangkan sebesar 27% memanfaatkan perangkatnya untuk melakukan transaksi jual beli secara daring (e-commerce/online shop).

Perilaku tersebut tentunya sangat memberikan dampak terhadap perkembangan dan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Begitu besarnya persentase pengguna smartphone tentunya turut mewarnai kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di bidang sarana, prasarana, infrastruktur dan perangkat lunak. Hal tersebut juga mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk berbenah diri dan meningkatkan standar

pelayanannya ke bentuk pelayanan inovatif yang berbasis teknologi informatika dan telekomunikasi.

1.3.2.2 Inovasi Tahun 2016

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, bahwa urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan untuk mendukung Misi ke satu, ‘Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi’, dengan tujuan meningkatkan implementasi *e-government*, dan tujuan mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas. Penanganan urusan ini dijabarkan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Langkah-langkah inovasi dikembangkan sebagai terobosan untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 telah dilakukan dan terus dikembangkan beberapa inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan, antara lain:

- a. Digitalisasi pelayanan perizinan
Perkembangan teknologi informasi komunikasi dimanfaatkan untuk membantu kemudahan masyarakat mengakses layanan dan percepatan layanan perizinan oleh aparatur BPPTPM. Kegiatan yang sudah dikembangkan antara lain :
 - b. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SMART
Aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan digunakan untuk proses pendaftaran di *front office* sampai dengan proses di *back office*. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu-menu yang memungkinkan setiap tahapan proses perizinan dan non perizinan yang digunakan oleh karyawan BPPTPM (user) dapat dimonitor secara *real time*. Selain itu, aplikasi ini menghadirkan pelaporan data-data seluruh jenis perizinan.
 - c. Layanan pendaftaran online
Layanan pendaftaran secara online disediakan berbasis website sehingga masyarakat dapat mengakses di www.bpptpm.kotabogor.go.id. Pelayanan pendaftaran online ini memungkinkan masyarakat dapat mendaftar dimanapun. Pengembangan aplikasi ini diapresiasi oleh Kemen PAN dan RB, dengan hadirnya Menteri PAN RB dan lembaga Ombudsman dalam launching pendaftaran online di kantor BPPTPM.
 - d. Tracking Service
Aplikasi *Tracking service* adalah satu menu yang dapat diakses di website BPPTPM oleh pemohon untuk mengetahui dan memeriksa setiap tahapan

proses perizinan dan non perizinan yang telah diterima oleh BPPTPM. Aplikasi ini memberikan informasi secara real time.

e. SMS Gateway

Dikembangkan dan dioperasikan sejak September 2015 sebagai media informasi kepada masyarakat terhadap status permohonan. Dua informasi yang diberikan kepada pemohon yaitu diawal permohonan dan diakhir proses selesai. Informasi diberikan diawal, ketika berkas sudah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas *Front Office*. Sedangkan informasi kedua diberikan ketika permohonan telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Untuk perizinan yang berretribusi, disampaikan juga informasi besaran retribusi yang harus dibayar.

f. *Host to Host* dengan Bank bjb

Pengembangan *host to host* dengan Bank bjb dilakukan agar memberikan kemudahan pembayaran retribusi bagi pemohon. Saat ini, dengan program *host to host* pembayaran retribusi sudah dapat dilakukan melalui ATM, teller Bank bjb diseluruh cabang dan loket payment point Bank bjb.

g. *One Day Service* (ODS)

Layanan perizinan ODS atau satu hari selesai diberikan kepada masyarakat agar memberikan kemudahan dan kecepatan layanan. Pemohon yang mendapat layanan ODS ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam program ODS ini, antara lain :

1. Pemohon membawa persyaratan secara lengkap dan benar.
2. Pemohon datang sendiri tanpa mengkuasakan pada orang lain.
3. Batas waktu memasukkan berkas ODS sampai pukul 11.00 WIB.

Ada 13 jenis layanan yang dapat diberikan dalam program ODS, antara lain:

1. Pemisahan / *splitting* IMB di bawah 10 (sepuluh) unit
2. Balik nama IMB yang tidak mengubah bangunan, baik luasnya maupun fisik bangunannya
3. Perpanjangan persetujuan pemakaian tanah untuk reklame (PPTR)
4. Perpanjangan Izin Gangguan (HO) yang tidak mengalami perubahan luas dan bidang usaha dengan luasan maksimal 100 M2
5. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (izin prinsip PMDN)
6. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 6 (enam) meter persegi.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
10. Tanda Daftar Gudang (TDG)

11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 12. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 13. Izin Angkutan Dalam Trayek
- h. Layanan Loker Prioritas
- Loker prioritas diberikan kepada pemohon yang langsung mengurus perizinan tanpa memberi kuasa kepada orang lain. Loker prioritas dibuka setiap hari untuk meminimalisir praktek percaloan perizinan. Disiapkan 2 loker prioritas sedangkan loker dengan surat kuasa hanya 1 loker saja.
- i. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bekerjasama dengan Dirjen Pajak Kota Bogor menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem KSWP ini. Kerjasama ini telah memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor. Dengan sistem ini akan diketahui kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak selama 2 tahun terakhir.
- j. Integrasi aplikasi SMART dengan SPIISE
- Integrasi antara aplikasi SMART yang ada di BPPTPM Kota Bogor SPIISE yang ada di BKPM. Dengan adanya integrasi ini setiap permohonan penanaman modal tidak perlu lagi mendaftarkan melalui aplikasi SPIISE yang ada di BKPM karena dengan input di aplikasi SMART secara otomatis sudah tercatat dalam SPIISE
- k. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Kerjasama dengan BPJS dalam bentuk persyaratan dimana setiap pemohon yang mengajukan permohonan harus sudah dilindungi asuransi dalam hal ini adalah BPJS. Perlindungan ini ada dalam bentuk kepesertaan BPJS, dan menjadi salah satu syarat permohonan perizinan.
- l. Pelayanan Kantor KAS BJB di Ruang Pelayanan
- Selama tahun 2016 diruang pelayanan sudah dilengkapi dengan Payment Point Bank BJB. Namun untuk lebih memudahkan pemohon dan pembayaran retribusi dan transaksi lainnya ditingkatkan menjadi kantor kas

Selama kurun waktu Tahun 2016, realisasi investasi Kota Bogor mencapai Rp. 2.315.438.675.457,-. Dengan nilai PMA sebesar Rp. 455.646.572.793,- dan nilai PMDN sebesar Rp 1.859.792.102.664,- dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 8 perusahaan dan 301 perusahaan PMDN.

Sedang pada tahun 2015 nilai realisasi investasi mencapai Rp. 3.104.313.574.444,- Dengan nilai PMA sebesar Rp 264.878.750.000,- dan nilai PMDN Sebesar Rp 2.839.434.824.444,-. Dengan demikian realisasi investasi di Kota Bogor tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 25,41 % dari realisasi investasi

pada tahun 2015. Dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 1 dan PMDN sebanyak 880 perusahaan.

Tabel 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa di 2016 s.d. Triwulan III Tahun 2017.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Membangun sistem basis data antarinstansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik	Jumlah Regulasi tentang implementasi Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (Perwali)	5	Dalam Proses	100% di bulan Desember 2017
Dalam mencapai sasaran tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
Jumlah regulasi tentang Implementasi Teknologi dan Komunikasi (dokumen perwali)	5	Masih berupa draft Raperda (belum dibahas Pansus DPRD)		
Jumlah unit kerja (OPD, UPTD, kelurahan, kecamatan, puskesmas, BUMD) yang terkoneksi internet	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bag Kemasyarakatan (SIM Hibah dan Bansos, SIM Kemasyarakatan) 2. BPLH (Sistem Informasi Lingkungan Hidup) 3. BPPTM (Smart) 4. Dinas Kesehatan (Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan; SIM Puskesmas ; eSIR) 5. Disdukcapil (SIMDUK (SIK) dan SIM eKTP) 6. Dispenda (SIMPATDA, SIM PBB(client), SISMIOP(server), SIM BPHTB, SIPDEH(eSPTPD), POSTPBB untuk mobil keliling (Payment Online System), tapping box, Post PBB, Siwarah, Aplikasi Penyampaian SPPT-PBB, Aplikasi Anjungan SIPDEH) 7. DLLAJ (Penerbitan SIPA, SySSIUA (Sistem Surat Izin Usaha Angkutan Umum), SysRET (Sistem Retribusi Usaha Angkutan Umum), SIP2KB (Sistem Informasi Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor) 8. Kantor KOMINFO (SIDALMENTEL, Web Aspirasi Pengaduan Call Center, SIM Wilayah 9. Dinas Pendidikan (PPDB online dan SIPERI) 10. DKP (SIM Pengelolaan Sampah) 11. Bag. Adalbang (LPSE) 12. UPTD RPH Terpadu, Distani (Web RPH Terpadu) 13. Kelurahan Cibadak (SIMANAH, Letter C Digital, SMS Gateway Infomrasi Pelayanan Kelurahan) 		

		14. BPBD (SmartAlarm (tombol panic))
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPD (unit)		Pengembangan SIM Wilayah dan SIM Paten versi online, pengembangan simata.kotabogor.go.id
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPD (unit)		2 (SIM Mitigasi Bencana dan SIM Informasi Pemerintahan)
Penyediaan repository data warehouse sebagai basis decision support system	Tersedia	Tersedia

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

1.3.2.3 Pengembangan dan Pendampingan Aspirasi Pengaduan

Tujuan dari dikembangkannya SIM Aspirasi Pengaduan On Line adalah sebagai perangkat pendukung tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan yang masuk ke SIM Aspirasi Pengaduan On Line akan di teruskan atau di disposisi kepada OPD Teknis yang terkait. Dan masing-masing OPD akan mendapatkan notifikasi dari setiap pengaduan yang masuk ke OPD Teknis. Dan melalui SIM ini, OPD dapat menindaklanjuti dan menjawab pengaduan warga tersebut.

Tabel 11. Rekap Aspirasi Pengaduan Online 1 Januari S.D 30 Desember 2016

No	Dinas-dinas	Jumlah	Yang Sudah Dijawab	Yang Belum Dijawab
1	Dinas Binamarga	117	102	15
2	Bappeda	2	1	1
3	Dispenda	5	3	2
4	Bpbd Kota Bogor	30	5	25
5	Disdukcapil	85	77	8
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	90	78	12
7	Distani	2	2	0
8	Satpol PP	114	102	12
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	0	2
10	Disnakersostrans	20	18	2
11	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	0	4
12	DLLAJ	259	223	36
13	Dinas Pendidikan	32	25	7
14	Dinas Kesehatan	13	12	1



15	BPPTPM	5	5	0
16	Wasbangkim	14	13	1
17	Disbudpar	5	5	0
18	Inspektorat	2	0	2
19	UMKM	2	0	2
20	Kecamatan Bogor Utara	3	0	3
21	Kecamatan Bogor Selatan	6	0	6
22	Kecamatan Bogor Barat	9	0	9
23	Kecamatan Bogor Timur	8	7	1
24	Kecamatan Bogor Tengah	2	0	2
25	Kecamatan Bogor Tanah Sareal	12	0	12
26	Kantor Kominfo	4	2	2
27	Kantor Pemuda dan Olahraga	2	0	2
28	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0	0	0
29	Bag. Hukum Setdakot Bogor	1	1	0
30	Bag. Kemasyarakatan Setdakot Bogor	0	0	0
31	Bag. Humas Setdakot Bogor	7	6	1
32	PD Pasar	2	1	1
33	PDJT	6	0	6
34	RSUD	1	0	1
	Jumlah	866	688	178
			79,45 %	25,87 %

Sumber : LKPJ Walikota Bogor Tahun 2016

Hal-hal pengaduan yang belum terjawab disebabkan antara lain karena surat kaleng, dobel entry untuk pertanyaan yang sama dan salah tujuan pengiriman yang seharusnya ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Bogor.

1.3.2.4 Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Inspektorat Kota Bogor melakukan monitoring dan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas. Untuk jumlah SKPD yang mendapat predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" pada tahun 2016 belum ada SKPD yang ditetapkan menjadi SKPD berpredikat WBK dikarenakan sesuai dengan Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas yang salah satu syaratnya adalah Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016 masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Inspektorat Kota Bogor mendorong SKPD untuk mendapatkan predikat Wilayah bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan monitoring pada 33 SKPD, kecuali Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Utara, RSUD dan BPBD

Selain kegiatan tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pada tanggal 22 Desember 2016, telah dilakukan pengukuhan Unit Saber Pungli Kota Bogor bertempat di Ruang Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, yang anggota terdiri dari Unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, Unit saber pungli Kota Bogor dibentuk berdasarkan Ketusan Walikota Bogor Nomor 700.45-280 Tahun 2016. Sekretariat Unit Saber Pungli beralamat Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Juanda No.10 .

Tahun 2016 Inspektorat Kota Bogor telah Gratifikasi (UPG) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-255 tahun 2016 memiliki Unit Pengendalian Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh.

1.3.3 Analisis Daya Saing

1.3.3.1 Program Peningkatan Daya Saing dan Penanaman Modal

Penanganan Urusan Penanaman Modal pada Pemerintah Kota Bogor ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang meliputi perumusan penyusunan kebijakan Penanaman Modal sampai pelayanan publik. Adapun urusan penanaman modal dijabarkan melalui program Peningkatan daya saing penanaman Modal

Tabel 12. Capaian kinerja Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (RPJMD 2015-2019)

Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Keterangan
Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100%	100%	
Nilai realisasi investasi (Rp.)	2.200.000.000.000	2.315.438.675.457	105%
Jumlah promosi penanaman modal	4	5	a. Indonesian City Expo 2016 b. De Syukron c. West Java

			Investment Expo 2016 d. Adelaide Show e. Penyusunan buku profil investasi
Cakupan perizinan yang terlayani (%)	100%	100%	

Capaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri

Pelaksanaan promosi Dalam negeri dilakukan sebagai upaya dalam rangka penyampaian informasi tentang peluang dan potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Bogor, pada tahun 2016 ini BPPTPM telah mengikuti 5 kali pameran yaitu:

- a. **Pameran Indonesia City Expo 2016** yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli s.d 31 Juli 2016 bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jambi Jl. H. Agus Salim Kota Jambi Provinsi Jambi. Pameran dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi H. Zumi Zola dan dihadiri oleh Unsur Muspida Provinsi Jambi, OPD di lingkungan Provinsi Jambi, Walikota dan jajaran OPD Pemerintah Kota Jambi, seluruh Walikota peserta Munas APEKSI 2016, BUMD di lingkungan Provinsi dan Kota Jambi, Asosiasi Pengusaha serta stake holder lainnya Pelaksanaan Pameran Indonesia City Expo 2016 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2016 yang diikuti 94 (sembilan puluh empat) perwakilan Kota di seluruh Indonesia.
- b. **Ikut serta dalam Kegiatan De Syukron** di Kota Bandung yang dilaksanakan mulai tanggal 2 s/d 3 September 2016 De' Syukron merupakan rangkaian kegiatan promosi Daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat sekaligus merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Barat ke 68 di Halaman Gedung Sate, Bandung kegiatan De'Syukron ini diikuti oleh 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.
- c. **Berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 dan Regional Investment Forum (RIF)** dilaksanakan pada hari Rabu 12 Oktober dan Kamis tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di Gedung Pusat Niaga (Trade Mart Buliding) JIExpo Kemayoran Jakarta, dalam kegiatan pameran ini ditampilkan berbagai peluang investasi dan potensi Daerah Kota Bogor baik dalam bentuk buku profil, leaflet dan banner investasi yang ada dan ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pada kesempatan tersebut BPPTPM lebih banyak menyampaikan informasi

investasi di sektor Pariwisata serta produk-produk unggulan Kota Bogor yang tercantum dalam buku profil peluang sektor Pariwisata Kota Bogor.

- d. **Kegiatan West Java Investment Forum (WJIF)** kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 26 s.d 28 Oktober 2016 bertempat di Hotel Harmony One Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, WJIF ini merupakan event promosi terintegrasi Tourism, Trade and Investment (TTI) yang bertujuan untuk menawarkan beragam potensi dan peluang investasi yang ada di Jawa Barat dengan cara menawarkan langsung kepada investor potensial. Kegiatan WJIF memberikan manfaat maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan Jawa Barat dalam rangka meningkatkan minat investasi di Jawa Barat serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Unggulan UMKM Kota Bogor yang ditawarkan antara lain Produk Keramik (Lesung Ceramiks), Funitrure Bambu (Suratin Bambu) serta Kerajinan aceccsories logam (Fida Arts).
- e. **Bogor Investment Expo 2016** dilaksanakan mulai hari Selasa dan Rabu tanggal 8 s.d 9 Nopember 2016 bertempat di Gedung Menara Mandiri Jakarta Lt.9 Jakarta Pusat. Tujuan dari dilaksanakannya Bogor Investment Expo 2016 adalah untuk penyebarluasan informasi, serta diharapkan terjadi interaksi bisnis langsung yang efektif antara investor, pelaku UMKM, pelaku usaha lainnya dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kota Bogor melalui BPPTPM Kota Bogor selain hadir dalam kegiatan seminar dan bisnis forum secara khusus juga diberikan 2 (dua) buah stand pameran untuk mempromosikan peluang investasi dan produk unggulan dari Kota Bogor Dalam kegiatan pameran Bogor Investment Expo 2016 seperti:
 - a) Terminal Agribisnis Rancamaya
 - b) Pengembangan Sky Walk Baranangsiang-Suryakencana
 - c) Pengembangan Kawasan Wisata Situ Gede
 - d) Pembangunan Park and Ride Kawasan Suryakencana
 - e) Pembangunan Pedestrian MallSelain itu stand Kota Bogor juga menampilkan beberapa produk unggulan Kota Bogor yang terdiri dari produk kerajinan serta produk makanan dan minuman kemasan khas Kota Bogor.
- f. **Penyusunan profil investasi dan potensi daerah** merupakan salah satu pendukung dalam program peningkatan daya saing penanaman modal. Selain sebagai media informasi terkait dengan peluang dan potensi investasi yang ada di wilayah Kota Bogor juga sebagai salah satu pendukung dalam penyelenggaraan Temu Investor 2016. Kegiatan dalam penyusunan profil investasi dan Potensi daerah yaitu *Penyusunan Buku*

Profil Investasi dan Potensi Daerah Kota Bogor yang lebih fokus terhadap peluang dan potensi investasi di Sektor Pariwisata, Buku Profil Investasi Sektor Pariwisata Kota Bogor ini diperuntukan sebagai gambaran bagi para calon investor untuk berinvestasi di Kota Bogor. Buku ini disampaikan melalui berbagai ajang pameran dan kegiatan yang diikuti oleh BPPTPM Kota Bogor, Dinas dan Instansi terkait lainnya serta dalam agenda pertemuan Walikota Bogor dengan investor dan tamu lainnya.

2) Promosi Luar Negeri

Untuk Tahun 2016 Agenda promosi luar negeri yang diikuti oleh BPPTPM Kota Bogor adalah kegiatan *Royal Adelaide Show 2016* (RAS 2016) yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 11 September 2016 bertempat di Adelaide Showground, Adelaide Australia Selatan. Dalam Kegiatan RAS 2016 tersebut Delegasi dari Provinsi Jawa Barat terdiri dari dari Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat, BPMPTSP Kabupaten Bogor, Kadin Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, dan BPPTPM Kota Bogor. Keikutsertaan Jawa Barat pada pameran Royal Adelaide Show 2016 tersebut diantaranya sebagai salah satu pelaksanaan dari kerjasama yang telah dibangun sebelumnya antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Australia Selatan, berdasarkan MOU yang telah ditandatangani pada tanggal 24 September 2015 di Adelaide, Australia Selatan dalam rangka meningkatkan kerjasama investasi, perdagangan dan kebudayaan; Dalam kegiatan pameran tersebut Provinsi Jawa Barat memiliki stand yang berada di area “Jubilee” lot C43, dengan materi promosi yang ditampilkan berupa beberapa peluang investasi yang ada dan tersebar di Wilayah Provinsi Jawa Barat antara lain:

- a) Development of TOD Sukaresmi (Kota Bogor)
- b) Transfer Point Bubulak (Kota Bogor)
- c) The Integrated Area Sport of Facilities Expansion Jalak Harupat Stadium
- d) Meat Business Center
- e) Development Corridor Toll Banjar-Pangandaran
- f) Port Of Cirebon
- g) Railways Development
- h) Wado-Sumedang Hydro Electric Power Plant and Tourism
- i) Tourism Area Development of Tanjungsari

Beberapa produk unggulan UMKM Kota Bogor diantaranya adalah Bross and handmade accessories “Ramiza Boutique”, Fida Art Acecories, Kerajinan kujang “Kujang Pajajaran” dan Batik Lawas sari tumbuhan Khas Kota “Batik Bogor Mago”

Rangkaian kegiatan level internasional lainnya yang diikuti antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan temu bisnis di Konjen RI di Sydney. Kunjungan ke KJRI dilaksanakan di kantor KJRI Sydney 236-238 Maroubra Rd, Maroubra NSW 2035, Australia, yang menghasilkan beberapa hal yang disampaikan oleh Konjen RI terkait dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Australia Selatan antara lain :
 - 2) Bidang Pendidikan, terdapat sejumlah sarana pendidikan di Australia Selatan khususnya yang ingin membangun kerjasama dengan pendidikan di Indonesia. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran tenaga SDM pengajar, pertukaran pelajar, dan materi pelajaran. Saat ini terdapat 84 sekolah di Australia yang mengajarkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran, dan diperkirakan akan bertambah di tahun 2017. Selain daripada hal tersebut di atas, Pemerintah Australia berencana untuk berinvestasi pada sekolah kejuruan.
 - 3) *Smart city*, Pemerintah Australia sangat mendukung perkembangan *Smart city* di beberapa daerah seperti Kota Bandung dan Kota Bogor. Pemerintah Australia khususnya memiliki minat dalam kerjasama penyediaan perpustakaan. Perpustakaan yang dimaksudkan adalah sebuah tempat dengan konsep lebih dari sekedar tempat membaca buku.
 - 4) Bidang pertahanan, pabrik kapal selam Australia terdapat di bagian Australia Selatan. Terdapat beberapa peluang kerjasama contoh dengan PT Pindad Persero yang saat ini sudah masuk kedalam persetujuan Perjanjian Kerjasama.
 - 5) Produk-produk premium, khususnya pada bidang pertanian dan perikanan.
 - 6) Peningkatan tenaga SDM, baik melalui pelatihan singkat maupun magang di beberapa organisasi.
 - 7) Bidang lainnya seperti Infrastruktur pantai, lingkungan, dan bidang lain yang dapat diupayakan untuk peninjauan kerjasama. Perwakilan dari Indonesia *Trade Promotion Center (ITPC)*.
 - 8) Sementara perwakilan dari Indonesia *Investment Coordinating Board (IICB)* menyampaikan bahwa negara Australia masih menempati posisi 12 sebagai penanam modal asing di Indonesia. Untuk meningkatkan kembali investasi tersebut sangat dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai investor baik dalam maupun luar negeri. Beberapa contoh peluang investasi tersebut antara lain TOD Sukaresmi, Transfer Point Bubulak, Stadion Jalak Harupat, Infrastruktur Tol Banjar-Pangandaran, Pelabuhan Cirebon, Jalur kereta-apian, PLTA Sumedang, Area Pariwisata Tanjung Sari Kabupaten Bogor, dll.

- 9) Pertemuan antara Delegasi Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Australia Selatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sosialisasi dan Promosi BPMPT, melalui kegiatan Coffee Morning meeting, yang diselenggarakan di Mezzanine Coffee Room yang terletak di wilayah VIP Royal Adelaide Showground. Peserta Coffee Meeting ini adalah para perwakilan pemerintah Australia Selatan beserta para pelaku usaha dari Australia Selatan.
- 10) *Field visit ke beberapa perusahaan* rekomendasi dari pemerintah Australia Selatan, yaitu:
 - a. Mt. Compass Dairy Farm
 - b. Peternakan sapi yang berada di 54 Goolwa Road, Mt. Compass 5210. Peternakan ini melaksanakan peternakan sapi yang terpadu. Mulai dari pembiakan sapi, pemerahan hingga pemrosannya menjadi produk jadi berupa keju dengan peralatan yang modern.
 - c. Fox Creek Wines
 - d. Perkebunan dan pengolahan anggur modern yang beralamat di 1 Chapel Hill Road, McLaren Vale SA 5171. Dari *field visit* ini diperoleh beberapa kemungkinan untuk kerjasama antara Australia Selatan dan Jawa Barat, baik dalam hal barter teknologi, maupun investasi.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Pemerintah Kota Bogor akan menindaklanjuti kerjasama dengan Australia Selatan di bidang perpustakaan untuk mendukung investasi *Smart City*.
2. Penjajakan Sister City antara Kota Bogor dengan Kota Adelaide.

1.3.4 Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah

1.3.4.1 Visi dan Misi Dalam RPJPD

Muatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 mencantumkan 5 (lima) tahapan proses perencanaan pembangunan lima tahunan yang dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”. Tolak ukur tercapainya Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada sektor jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supermasi hukum.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bogor dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. RPJMD Tahun Pertama (2005-2009) mengacu kepada Renstra Kota Bogor Tahun 2005-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima.
2. RPJMD Tahun Kedua (2010-2014) mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010, diarahkan kepada penataan transportasi, kebersihan, penanggulangan masalah kemiskinan dan penataan pedagang kaki lima.
3. RPJMD Tahun Ketiga (2015-2019), mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014, diarahkan kepada penataan transportasi dan angkutan umum, Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH, Transformasi budaya dan reformasi birokrasi serta Penanggulangan Kemiskinan
4. RPJMD Tahun Keempat (2020-2024), ditujukan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.

Berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, pembangunan difokuskan pada penuntasan 6 (enam) permasalahan yang dihadapi Kota Bogor yaitu:

1. Penataan transportasi dan angkutan umum;
2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota;
3. Penataan dan pemberdayaan PKL;
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya;
5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi; dan
6. Penanggulangan kemiskinan

Masa pembangunan 5 (lima) tahun kedua ini (tahun 2015 – 2019), dilaksanakan dalam upaya semakin memperkuat landasan pembangunan sebagai

bentuk konsistensi dan kontinuitas untuk mencapai tujuan akhir pembangunan Kota Bogor.

1.3.4.2 Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Terdapat enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor dalam periode 2015 – 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah

1. Penataan Transportasi Dan Angkutan Umum

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015 – 2019, pelaksanaan pembangunan transportasi tertuang dalam Misi-3, yaitu menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan, yang bertujuan mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda.

Sasaran penanganan bidang prioritas penataan Transportasi dan angkutan umum:

1. Terwujudnya system angkutanumumkota yang nyaman dan ramah lingkungan;
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda;
3. Berkurangnya kemacetan.

Arah kebijakan penanganan transportasi dan angkutan umum Misi ketiga RPJMD 2015-2019 adalah

1. mewujudkan system pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan berdasarkan pada peningkatan kenyamananandalamberjalan kaki yang ramahbagisetiapkalangan.
2. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama program *sustainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP GIZ)* akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.
3. Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parker (*Park on ride*). Pengadaan gedung parker pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan *land banking*. Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan *non-motorized transport*.

Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan lima program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPJMD 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
3. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
4. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;
5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

2. Penanggulangan Kemiskinan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015 – 2019, pelaksanaan pembangunan transportasi tertuang dalam Misi-2, yaitu Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur, yang bertujuan :

- Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat
- Meningkatkan kualitas permukiman
- Meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak

Sasaran penanganan bidang prioritas penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
- Berkurangnya kawasan permukiman kumuh
- Tertangani dan terfasilitasinya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin
- Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat

Arah kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan Misi kedua RPJMD 2015-2019 adalah :

- Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS
- Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta

program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.

- Melakukan pembinaan terhadap kelompok PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok PMKS
- Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang *up-to-date* dan iklim bekerja
- Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

Penanggulangan kemiskinan Kota Bogor difokuskan pada pemenuhan hak dasar dengan sasaran pada tiga kategori miskin (miskin, hampir miskin, dan rentan miskin). Terdapat 20 program pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD yang mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Peningkatan Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Pendidikan Menengah;
10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
11. Peningkatan Kesempatan Kerja;
12. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
13. Lingkungan Sehat Perumahan;
14. Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
16. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
17. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
18. Pembinaan Anak Terlantar;
19. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
20. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lainnya.

Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lainnya tertuang dalam misi ke-3 (tiga) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu menjadikan Bogor Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas penataan ruang.

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019:

- a. Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan,
- b. Meningkatnya implementasi rencana tataruang dan kendali terhadap pemanfaat ruang
- c. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Arah Kebijakan penanganan Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Misi ketiga RPJMD Kota Bogor 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian
2. Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting

Penanganan penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda;
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk Meningkatkan kualitas penataan ruang yang bersih, indah dan nyaman dengan PKL berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sasarannya adalah Tertatanya Pedagang Kaki Lima serta pasar tradisional dan Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Misi ketiga RPJMD Kota Bogor 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting

- Membangun pangkalan data PKL yang digunakan sebagai basis dalam melakukan identifikasi dan pembatasan jumlah pedagang, disertai dengan pendekatan humanis secara kelembagaan
- Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan penindakan bagi PKL yang melanggar
- Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi PKL melalui *zoning and timing regulations*
- Revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya relokasi PKL dan menarik minat pengunjung

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

5. Penanganan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, penanganan persampahan dan kebersihan kota tertuang dalam Misi-3, yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan, yang bertujuan menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019:

1. Meningkatnya pelayanan persampahan;
2. Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle); dan
3. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat.

Arah kebijakan penanganan pelayanan persampahan dan kebersihan kota pada Misi Ketiga RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antar daerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem *sanitary landfill* serta pelayanan pengangkutan sampah.
2. Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW, dan Kelurahan. Maka dalam penerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.

Penanganan pelayanan persampahan dan kebersihan kota dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R;
4. Pengembangan Lingkungan Sehat.

6. Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi

Program Prioritas Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan dua misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019. Misi-misi tersebut adalah Misi ke-1 yaitu: Menjadikan Bogor Kota yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Misi Ke-5 yaitu: Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam misi-misi tersebut adalah: meningkatkan implementasi *e-government* dan mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas (Misi ke-1), serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (Misi ke-2).

Transformasi budaya dan reformasi birokrasi memerlukan penanganan yang cukup serius pada semua permasalahan struktural dan budaya/kultur. Soal struktural lebih mudah untuk ditangani karena penyelesaiannya di level kebijakan saja, akan tetapi soal kultural merupakan tantangan tersendiri. Mengubah budaya ini harus diawali dengan menerapkan sistem yang baik dan mampu memaksa anggota sistemnya untuk berperilaku sebagaimana digariskan. Mengawali pembentukan kebiasaan baru adalah dengan pemaksaan, dan pemaksaan yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah sistem.

Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melaksanakan transformasi budaya dan reformasi birokrasi antara lain: penempatan jabatan secara terbuka dengan kualifikasi yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai motivasi ekstra bagi aparatur sipil Negara, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan kepastian.

Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;

6. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
8. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
9. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
13. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2015 terdapat sebanyak 780.951 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja sebanyak 450.925 orang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja. Sebanyak 400.983 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya sebanyak 49.942 orang adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan.

Pada umumnya penduduk yang bekerja di Kota Bogor terserap pada lapangan pekerjaan perdagangan dan jasa-jasa. Dengan rincian sebanyak 120.802 orang bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan dan hotel, sedangkan yang bekerja pada lapangan pekerjaan jasa-jasa terdapat sebanyak 119.126 orang.

Penduduk yang bekerja di Kota Bogor menurut pendidikan terdapat sebanyak 60.117 berpendidikan SLTP, sebanyak 154.612 orang berpendidikan SLTA dan sebanyak 81.245 orang berpendidikan Akademi dan Universitas.

Untuk penyerapan tenaga kerja, angkatan kerja yang bekerja dijabarkan menurut lapangan pekerjaan utama dengan kriteria penduduk Kota Bogor yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja di kegiatan informal, yaitu kelompok pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; kelompok industri pengolahan; kelompok perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; kelompok jasa kemasyarakatan; serta kelompok lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan).

Jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, yaitu 4.981 jiwa di sektor kelompok pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; 58.416 jiwa di sektor kelompok industri pengolahan; 120.802 jiwa di sektor kelompok perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; 119.126 jiwa di sektor kelompok jasa kemasyarakatan; serta 97.658 jiwa di sektor lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan

komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan).

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2015 mencapai 73,65, meningkat 24 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2014 yang berada pada titik 73,10. Dengan nilai IPM sebesar 73,65 Kota Bogor berada di peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat setelah Depok, Bekasi, Bandung dan Cimahi.

Kontribusi IPM tahun 2015 tersebut diperoleh dari pencapaian indikator-indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan PNB per kapita selama Tahun 2015. Angka HLS mencapai 12,36 tahun, RLS mencapai 10,20 tahun, AHH mencapai 72,88 tahun, dan PNB per kapita sebesar Rp 10.576.370,-.

1.3.4.3 Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bogor, pertumbuhan perekonomian Kota Bogor Tahun 2016, dihitung dari nilai PDRB seri 2010 menurut kategori lapangan usaha : pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

a. Potensi Unggulan Daerah

Struktur perekonomian Kota Bogor dapat ditinjau dari proporsi peranan masing-masing kategori ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kota Bogor. Pada tahun 2015, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,91 persen) dan kategori Industri Pengolahan (18,54 persen) mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor. Struktur ekonomi ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai Kota Urban.

PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dapat dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Sebagian besar kategori dapat dirinci lagi menjadi beberapa

subkategori atau golongan. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klarifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. PDRB Sektoral Kota Bogor

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2015	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	253.951,95	225.137,69
B	Pertambangan dan Penggalan	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	5.998.600,60	4.843.786,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.925.046,85	898.231,83
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	31.953,59	27.361,22
F	Konstruksi	3.647.802,34	2.848.754,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.088.063,38	5.650.090,63
H	Transportasi dan Pergudangan	3.776.163,74	2.893.357,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minun	1.421.383,40	1.119.753,25
J	Informasi dan Komunikasi	1.521.416,21	1.506.674,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.137.419,91	1.673.509,16
L	Real Estat	716.268,71	555.976,80
M, N	Jasa Perusahaan	675.244,69	516.834,82
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.878,40	660.730,22
P	Jasa Pendidikan	907.452,16	718.858,00

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.124,90	313.143,35
R, S, T, U	Jasa Lainnya	925.906,78	843.363,78
PDRB		32.356.677,61	25.295.564,62
PDRB tanpa Migas		32.356.677,61	25.295.564,62

Sumber : PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (BPS, 2016)

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2015 telah mencapai Rp 2.356.677.610.000,- atau meningkat 10,05% dibanding Tahun 2014 yang mencapai Rp 29.102.228.900.000,-. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp 25.295.564.620.000,- atau meningkat 5,85% dibanding pencapaian pada Tahun 2014 sebesar Rp 23.815.328.800.000,-.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh empat sektor lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,90%, industry pengolahan sebesar 18,53%, konstruksi sebesar 11,27%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 11,67%.

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2014 sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2014 mencapai level 6,13%, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 5,97%. Perlambatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global yang juga mengalami tekanan dan perlambatan laju pertumbuhannya.

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2015 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 30,88 juta rupiah per tahun, meningkat 9,19% dibandingkan PDRB per kapita tahun 2014 yang mencapai 28,23 juta rupiah per tahun.

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

1.3.4.4 Kelembagaan Perangkat Daerah

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016, maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. Disebutkan dalam PP itu, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini juga menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah, pada akhir bulan Desember 2016 Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2016 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2016.

Dalam aturan tersebut Perangkat Daerah Kota Bogor terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari 12 dinas termasuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas tipe B terdiri dari 8 dinas;
- f. Dinas tipe C terdiri dari 1 dinas;
- g. Badan tipe A terdiri dari 1 badan;
- h. Badan tipe B terdiri dari 3 badan;
- i. Kecamatan tipe A terdiri dari 6 kecamatan dengan kelurahan sebanyak 68 kelurahan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dalam upaya pencapaian Visi menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan, perlu adanya inovasi dan kreativitas dalam pencapaian misi menjadikan Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi. Maka

dibentuklah Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang berdasarkan Perda perangkat daerah ditingkatkan kapasitasnya menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfostandi) dengan status dinas tipe A.

Diskominfostandi Kota Bogor memiliki 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 12 (dua belas) kepala seksi, dimana 1 (satu) bidang yang dibentuk yaitu Bidang Layanan e-Government memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan layanan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan penata-kelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya di Bidang Layanan e-Government sebagai embrio dari terlahirnya *smart city* (kota cerdas), Diskominfostandi Kota Bogor telah menetapkan visi dan misi pengembangan e-government serta telah memiliki Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Bogor Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Pengembangan E-Government adalah sebagai berikut :

- a. **Visi** : Mewujudkan Bogor menjadi Smart Government menuju pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- b. **Misi** :
 1. Memperkuat tatakelola e-Government.
 2. Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat.
 3. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kota.
 4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

E-Government bukan hanya milik SKPD Kominfo akan tetapi merupakan urusan bersama seluruh SKPD dimana dalam melaksanakan implemmentasi *e-Government* perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kota, layanan system yang menjangkau ke seluruh tatakelola / birokrasi pemerintahan, sehingga seluruh komponen pemerintah kota mau tidak mau siap tidak siap, semua akan terlibat langsung dalam implementasinya.

Tujuan dari implementasi pengembangan *e-Government* adalah untuk memudahkan warga kota untuk mendapatkan pelayanan publik dan berinteraksi dengan pemerintah kota; memperbaiki kepekaan dan respon pemerintah kota terhadap kebutuhan warga; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Implementasi pengembangan *e-government* dalam rangka menuju pemerintahan yang baik dan benar, bukan lagi sebagai inisiatif coba-coba yang hanya ingin mendapatkan award dari institusi pemeringkatan kematangan implementasi, akan tetapi sudah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat, kelaziman jaman serta amanah nasional. Kajian pemeringkatan hanya



digunakan sebagai umpan balik yang selanjutnya digunakan untuk mengejar ketertinggalan dan memonitor arah implementasinya.

2

ANALISIS KESIAPAN KOTA BOGOR

2.1. ANALISIS STRUKTUR KOTA BOGOR

2.1.1. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kapasitas masyarakat di Kota Bogor memiliki nilai yang baik dalam menerima konsep *smart city*, mengingat bentuk piramida penduduk Kota Bogor yang cembung di bawah dan mengerucut di atas, kebanyakan penduduk usia produktif menyadari bahwa masa depan Kota Bogor juga dipengaruhi oleh perkembangan global dan perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi dunia. Tingkat literasi masyarakat terhadap konsep *smart city* meskipun belum merata, namun sudah cukup menjadi modal bagi Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan persentase literasi masyarakat yang bukan hanya sekedar tahu dan bisa, tetapi juga mampu mensosialisasikan *smart city* awareness kepada lingkungannya. Hal tersebut digambarkan dalam sebuah feature masyarakat Kota Bogor yang terhimpun dalam 96 komunitas bakat dan hobby kreatif yang terdaftar dan mendapat pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Salahsatu komunitas yang mendukung konsep *smart city* adalah adanya komunitas digital start up dan digital e-commerce.

Namun, pembinaan kepemudaan dan potensi sumber daya manusia yang berjalan secara nyata mendapatkan hambatan dari masih munculnya tindakan-tindakan yang kontra produktif dalam bentuk tawuran antar pelajar, vandalisme terhadap fasilitas publik, serta masih tidak disiplinnya masyarakat pengendara kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima. Dalam upaya penegakan Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dan Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial selama tahun 2016 terjaring 140 Anak jalanan, 201 Gepeng, 35 orang WTS, penyitaan minuman keras sebanyak 795 botol, 13 jerigen jenis tuak dan mercon / petasan : 10 pak. Selain itu, penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan PKL selama tahun 2016 dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk Penertiban PKL di kawasan Jl. MA.Salmun, Jl.Sawojajar, Jl.Sudirman, Jl.Mayor Oking, Jl.Sholeh Iskandar, dan Jl.Pajajaran dan Penertiban kawasan rawan PKL lainnya : kawasan Pasar Bogor (Jl.Tanjakan Empang, Jl.Otista, Jl.Juanda, Jl.Roda, Jl.Pedati), kawasan Jl.Suryakencana, kawasan Sempur dan Taman Kencana. Pada tahun 2016 tercatat dalam laporan kinerja Satpol PP Kota Bogor sebagai berikut :

1. Kejadian demo/ unjuk rasa : 34 kasus
2. Evakuasi bencana : 13 evakuasi
3. Perkelahian/ Pengrusakan : 4 kasus

Peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bogor tahun 2014 menempati urutan ke lima yaitu sebesar 73,10. Sedangkan urutan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah Kota Bandung sebesar 78,98; Kota Bekasi sebesar 78,84; Kota Depok sebesar 78,58 dan Kota Cimahi sebesar 76,06.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2015 mencapai 73,65, meningkat 24 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2014 yang berada pada titik 73,10. Dengan nilai IPM sebesar 73,65 Kota Bogor berada di peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat setelah Depok, Bekasi, Bandung dan Cimahi. Kontribusi IPM tahun 2015 tersebut diperoleh dari pencapaian indikator-indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan PNB per kapita selama Tahun 2015. Angka HLS mencapai 12,36 tahun, RLS mencapai 10,20 tahun, AHH mencapai 72,88 tahun, dan PNB per kapita sebesar Rp 10.576.370,-.

2.1.2. KUALITAS SUMBER DAYA PEMERINTAHAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *smart city* sudah bernilai baik dimana di dalamnya telah ada upaya dan pilot project integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Kekuatan sumber daya di lingkungan pemerintah Kota Bogor saat ini sebanyak 7.545 pegawai dimana 51,2% adalah lulusan D4/S1 dan 8,2% adalah lulusan S2 dengan jumlah lulusan S3 sebanyak 3 orang pegawai. Sebanyak 1,61% pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu komputer. sebanyak 42,98% adalah pegawai dengan usia 50 tahun ke atas, sedangkan persentase jumlah pegawai yang berusia 40-50 tahun terhadap keseluruhan jumlah pegawai adalah sebesar 40,62%. Sedangkan sisanya sebesar 21,16% adalah pegawai usia muda dari 20-40 tahun.

Saat ini tercatat sebanyak 98 aplikasi dipergunakan di lingkungan instansi pemerintahan dimana jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah tersedia di seluruh Kota Bogor, baik yang berbasis kabel FO, maupun yang bersifat wireless. Jangkauan (coverage) internet di Kota Bogor sudah menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Seluruh dinas/badan sudah terhubung menggunakan jaringan FO, sedangkan untuk kelurahan, dari 68 kelurahan se-Kota Bogor, sebanyak 31 kelurahan sudah terhubung dengan FO sedangkan 37 kelurahan lainnya masih

menggunakan wireless. Data center telah dibangun oleh Diskominfo Kota Bogor dengan kapasitas 15 server meskipun masih belum memenuhi standar kelayakan data center dan belum mampu menjadi Data Recovery Center. Akses internet terpusat yang didistribusikan ke 128 titik, sebanyak 69 titik sudah tersambung dengan jaringan FO. Untuk menunjang layanan internet ke masyarakat, Pemerintah Kota Bogor menyediakan 35 titik Hotspot Publik. Untuk mendukung seluruh aktivitas tersebut, kapasitas bandwidth jaringan akses bertumbuh secara signifikan dari tahun 2016 sebesar 350 MBPS dedicated, bertambah di tahun 2017 menjadi 500 MBPS dedicated, dan di tahun 2018 direncanakan penambahan kapasitas bandwidth sebesar 650 MBPS dedicated.

Walaupun demikian, kebutuhan tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi komunikasi/informatika. Pengamanan data yang dilakukan dengan memberlakukan password untuk akses data dan menggunakan firewall Barracuda untuk server di data center. Operator data center melakukan backup data dan aplikasi secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Untuk aplikasi internal atau tertentu menggunakan intranet, sedangkan aplikasi publik menggunakan subdomain, juga penggunaan subnet berbeda antara akses publik dengan akses jaringan internal. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dan TIK, Kota Bogor masih perlu membangun rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan secara komprehensif

Badan/dinas/kantor di Kota Bogor mengalami kebangkitan perencanaan TIK sejak tahun 2014 yang direalisasikan di tahun 2015. Cukup banyak aplikasi yang telah dibuat untuk kepentingan pelayanan publik, antara lain :

- a. SIMRAL integratif (e- perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan SAKIP).
- b. SIM-Gaji yang terkoneksi dengan Simpeg Kota Bogor, Taspen dan BPJS.
- c. SIMPEG Kota Bogor yang terkoneksi dengan SIM Gaji BPKAD.
- d. Sitanduk (mirroring SIAK) yang interoperabilitas dengan SIM Puskesmas di Dinas Kesehatan, SIM Wilayah dan SIM Paten yang digunakan di Kecamatan.
- e. Pos PBB, BPHTB online, SPPT PBB online, yang diaplikasikan di Badan Pendapatan.

Dari lingkup pelayanan publik, telah ada 37 aplikasi untuk 20 sektor layanan. Dalam lingkup administrasi dan manajemen umum telah ada 5 aplikasi, lingkup administrasi legislasi 1 aplikasi, manajemen pembangunan 3 aplikasi, manajemen

keuangan 4 aplikasi, dan manajemen kepegawaian 1 aplikasi. Pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan saran interaksi publik melalui Contact Center, Aspirasi Pengaduan Online dan NTPD 112.

Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari *smart city*, saat ini kesiapan Pemerintah Kota Bogor di dalam melaksanakan *smart city* merupakan factor kunci keberhasilan *smart city*. Hal tersebut turut ditunjang oleh visi diskominfostandi dalam upayanya memberikan layanan e-government kepada seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

2.1.3. KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

Kapasitas keuangan daerah Kota Bogor saat ini apabila mengikuti kepantasan dan tingkat resiko anggaran, berada dalam posisi yang baik dengan salahsatu indikatornya adalah porsi belanja aparatur yang hanya sebesar 48,5% dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat bahwa rasio struktur yang sehat antara belanja pegawai dan belanja non pegawai adalah sebesar 50:50. Realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 2.153.245.604.162,00 atau 99,78% dari target pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 2.158.083.504.950,00 Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 adalah sebesar Rp340.511.328.955,00 Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp 339.575.280.955,00 dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp 936.048.000,00 yang merupakan penerimaan piutang atas dana talangan raskin.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp 784.749.108.495,00 atau mencapai 107,79 % dari target pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar Rp 728.030.823.933,00. Realisasi Belanja tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.116.325.658.106,00 atau 87,24% dari Anggaran Belanja tahun 2016 sebesar Rp 2.425.741.153.905,00. Penghematan realisasi belanja tahun 2016 terdapat pada semua pos belanja. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.044.418.904.513,00 atau 91,92% dari anggaran.

Berdasarkan data BPS Kota Bogor yang dirilis pada tahun 2015, nilai total investasi yang ditanamkan di Kota Bogor oleh perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar sebesar Rp. 746 Miliar menurun sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai total investasi sebesar Rp. 803 Miliar.

Sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan *smart city* hingga saat ini harus diakui masih sangat terbatas. Di tahun 2017, belanja untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas e-

government pada Diskominfostandi Kota Bogor baru mencapai 0,7% dari keseluruhan APBD Kota Bogor atau sebesar Rp. 17.977.490.341,-. Untuk dapat mewujudkan salahsatu cita-cita layanan e-government dengan jaminan layanan sebesar 99,5% dengan estimasi support biaya mencapai 4% APBD, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program *smart city* dengan jumlah anggaran yang memadai.

Mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan, Perangkat Daerah ke depannya juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program *smart city*, seperti misalnya dana Corporate Social Responsibility (CSR), donasi sukarela, sponsorship, promosi terbuka dan bentuk lainnya.

2.2. ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR

2.2.1. INFRASTRUKTUR FISIK

Kesiapan infrastruktur fisik di Kota Bogor memberikan gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *smart city* daerah. Saat ini dalam hal infrastruktur fisik, sepanjang 358,977 dalam kondisi baik, 330,607 km jalan dalam kondisi moderate (sedang dan layak digunakan). Dengan kata lain sebesar 91% kondisi jalan di Kota Bogor dalam kondisi baik dengan rincian Jalan negara sepanjang 29,019 km, jalan provinsi sepanjang 8,989 km, dan jalan kota sepanjang 719,385 km dengan total panjang jalan keseluruhan sepanjang 757,393 km yang ditunjang oleh trotoar bagi pejalan kaki sepanjang 80 km.

Sedangkan untuk jalur khusus pejalan kaki (pedestrian), Kota Bogor telah menyediakan 2 jalur khusus pedestrian di Jl. Nyi Raja Permas sebagai akses ke Stasiun Kereta Api Komuter Jabodetabek dan jalur pedestrian seputaran Kebun Raya Bogor sepanjang 4 km. Berdasarkan data terdapat 16724 titik lampu PJU yang didominasi jenis lampu SHP/Sodium sebesar 62,9%. Sedangkan jenis lampu LED sebagai jenis lampu rendah emisi dan hemat energi sebesar 6,7%. Sedangkan untuk panel PJU, terdapat 1.284 panel yang pada umumnya berkondisi baik (43%), sedangkan yang berkondisi rusak hanya sebesar 1% atau 4 unit.

Untuk pelayanan perizinan, Kota Bogor menetapkan 3 Wilayah Pelayanan. Sedangkan untuk kawasan bisnis dan perkantoran tersebar di pusat Kota Bogor antara lain di ruas Jl. Soleh Iskandar, Jl. Pajajaran, Jl. Juanda, Jl. Otista, Jl. Suryakencana, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Merdeka, Jl. Veteran dan Jl. Perintis

Kemerdekaan. Untuk kawasan pasar terdapat 4 jenis pasar skala regional, yaitu Pasar Kebon Kembang, Pasar Bogor, Pasar Jambu Dua dan Pasar Induk Kemang/Kayumanis, sedangkan untuk pasar skala lokal terdapat beberapa pasar antara lain Pasar Cumpok, Pasar Depris, Pasar Tanah Baru, dan Pasar Purbasari. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di bidang kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan secara umum bernilai baik. Bukan hanya itu, angka inflasi Kota Bogor sepanjang tahun sebanyak 8 bulan berada di bawah 1 digit, yaitu berkisar di angka rata-rata 0,42 dengan nilai tertinggi inflasi di bulan Ramadhan dan akhir tahun (desember) dengan rata-rata nilai inflasi sebesar 1,67.

Di bidang pendidikan, dari 237 SD Negeri, terdapat 12 SD yang harus mendapatkan prioritas rehabilitasi gedung sekolah, sedangkan 18 SD harus sudah direvitalisasi. Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, kondisi gedung dan ruang kelas secara umum sudah baik. Hal ini tentunya bersifat dinamis sejalan dengan usia manfaat dan usia fisik dari gedung dan prasarana/sarana itu sendiri. Maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi *smart city* daerah.

2.2.2. INFRASTRUKTUR DIGITAL

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa salahsatu penopang *smart city* adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika yang pengoperasiannya memerlukan dukungan dari provider jasa telekomunikasi dan supply listrik yang berkesinambungan serta tidak terputus. Di Kota Bogor, persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G sudah 100% dengan skala layanan jaringan berayun di level bagus dan sangat bagus. Jaringan intra dan antara perangkat daerah sudah menggunakan infrastruktur jaringan fiber optic (FO), begitu pula dengan layanan jaringan FO di perumahan-perumahan.

Pemerintah Kota Bogor dalam komitmennya membangun *smart city* telah menyediakan jaringan broadband access untuk masyarakat dan sejumlah lokasi wireless untuk publik di kantor-kantor instansi pemerintah dan menyediakan fasilitas wireless (WiFi) di 5 taman yang ada di pusat Kota Bogor. Di bidang pengelolaan pendidikan, mengingat setiap satuan pendidikan di semua jenjang saat ini telah wajib menggunakan aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang berlaku secara nasional dan ada sebagian sekolah yang telah menyelenggarakan ujian secara online, secara umum semua sekolah di Kota Bogor telah memiliki akses internet walaupun belum semuanya mampu menyediakan akses layanan internet secara prima. Begitu pula halnya dengan fasilitas kesehatan di Kota Bogor. Seluruh

rumah sakit di Kota Bogor telah memberikan layanan berbasis elektronik/digital dan 25% nya telah memiliki layanan kesehatan online. Pasokan listrik di Kota Bogor secara umum cukup baik meskipun kejadian pemadaman listrik hampir terjadi setiap bulannya secara bergilir.

Di luar itu, mengingat Kota Bogor adalah kota dengan curah hujan tertinggi di Indonesia, memiliki prevalensi intensitas petir termasuk yang tertinggi di dunia, juga posisi lereng 4 gunung yang dapat menyebabkan terjadinya angin puting beliung, pemadaman listrik pun sering terjadi akibat gangguan alam secara insidental. Hingga saat ini tercatat jumlah langganan PLN sebanyak 216.896 nomor langganan dengan besar daya tersambung 414.521.516 KWH. kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program *smart city*, mengingat di dalam konsep *smart city*, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari *smart city*. Secara umum Kota Bogor telah memiliki kesiapan yang baik dalam hal infrastruktur digital.

2.2.3. INFRASTRUKTUR SOSIAL

Infrastruktur sosial merupakan bentuk sistem kemudahan yang dibangun untuk memenuhi keperluan masyarakat umum untuk melakukan aktivitas sosial keseharian mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur sosial tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Selain daripada itu, pihak swasta pun turut memainkan peranan yang penting dalam penyediaan infrastruktur sosial, mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi 100% kebutuhan bagi warganya. Di Kota Bogor, telah terbangun infrastruktur pendidikan mulai dari madrasah Raudhatul Athfal sebanyak 130 RA, Madrasah Diniyah 244 MD, Madrasah Ibtidaiyah 56 MI, Madrasah Tsanawiyah 38 MTs, dan Madrasah Aliyah 16 MA.

Sedangkan untuk pendidikan umum terdapat TK sebanyak 162 TK, SD sebanyak 285 SD, SMP sebanyak 116 SMP, SMA sebanyak 52 SMA dan SMK sebanyak 93 SMK. Untuk layana kesehatan, masyarakat ditopang oleh layana 19 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.024 beds, 24 Puskesmas dengan 59 beds, 29 Puskemas Pembantu dan 3 Puskesmas Keliling. Selain itu terdapat 602 praktek dokter umum, 554 dokter spesialis, 290 dokter gigi, 94 klinik kesehatan (balai pengobatan) dan 14 laboratorium kesehatan.

Kota Bogor merupakan kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil/sempit sebesar 11.850 Ha atau 118,5 Km² yang berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun dengan perkiraan kawasan terbangun mencapai lebih dari

60% kawasan, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah dengan perkiraan kawasan terbangun mencapai 80% (kecuali kawasan khusus Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor). Dengan kondisi demikian, banyak permukiman di Kota Bogor yang tidak memiliki lahan terbuka (lapangan/taman) untuk aktivitas warganya baik dalam hal seni, budaya, pendidikan, maupun olahraga.

Penyediaan lapangan olahraga yang tersebar di Kota Bogor dilaksanakan oleh pihak masyarakat secara privat dan terbatas pada sarana olahraga renang, bulu tangkis, tenis lapangan dan futsal. Kota Bogor sendiri memiliki kawasan Gelanggang Orah Raga Pajajaran yang memiliki fasilitas stadion sepak bola, kolam renang mila kencana, 3 lapangan volly outdoor, 1 lapangan outdoor multi event, 1 lapangan softball, 3 lapangan futsal outdoor, 2 lapangan basket semi indoor, 2 lapangan hall indoor multi event, dan 1 lapangan tenis semi indoor. Di bidang vokasi dan literasi, Kota Bogor memiliki 1 Perpustakaan Daerah dibawah pengelolaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang ditempatkan di lingkungan GOR Pajajaran.

Saat ini dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, wacana pertumbuhan penduduk, pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemekaran wilayah Kota Bogor akan menjadi wacana yang krusial dan menempati prioritas dalam agenda pembangunan Kota Bogor mengingat pola pembangunan yang sekarang dilaksanakan sudah bersifat vertikal, dikarenakan sudah sangat berkurangnya daya dukung wilayah untuk pembangunan yang bersifat horisontal/site/tapak.

2.3. ANALISIS KESIAPAN SUPRASTRUKTUR

2.3.1. KESIAPAN KEBIJAKAN DAERAH

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *smart city* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, saat ini Wali Kota Bogor telah membentuk dan menetapkan Dewan *Smart city* Kota Bogor yang tertuang dalam Keputusan Walikota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart city* Dan Tim Pelaksana *Smart city* Kota Bogor Tahun 2017.

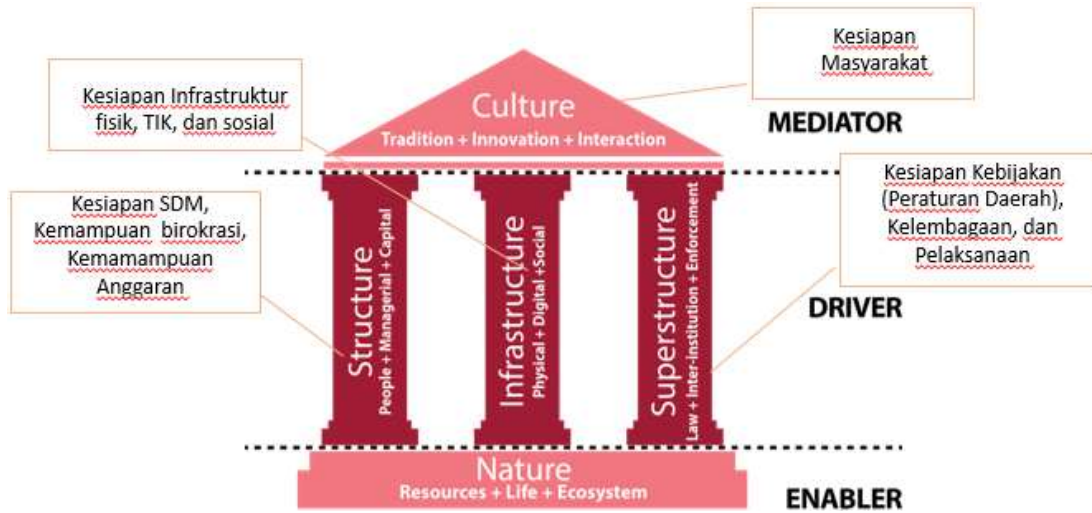
Meskipun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan *smart city* di Kota Bogor, saat ini penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis TIK diatur mengikuti Buku Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Kota Bogor Tahun 2014-2018. Masih dalam rangka penguatan e-government, saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika telah masuk dalam agenda Prolegda DPRD Kota Bogor tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan e-Government telah masuk dalam tahap perumusan finalisasi Raperwal. Dua perangkat aturan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK serta mampu mendorong lahirnya aturan tentang penyelenggaraan *smart city* di Kota Bogor. Saat ini Masterplan *Smart city* dan Peraturan Walikota yang mengatur penyelenggaraan *smart city* Kota Bogor sedang dalam proses penyusunan oleh Tim Pelaksana *Smart city* Kota Bogor. Kepastian terhadap keberlanjutan program *smart city* dalam jangka panjang di Kota Bogor tentunya tetap mengacu pada RPJMD Kota Bogor sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

Sebagai bagian utama dari Visi Kota Bogor yang ingin menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan, dengan tetap memegang komitmen untuk mewujudkan Misi Pertamanya yaitu menciptakan Kota Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi. Kedepannya, kiranya perlu untuk menetapkan mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program *smart city* sebagai penghargaan yang diharapkan mampu menjadi stimulan terhadap peningkatan kinerja *smart city* di seluruh perangkat daerah yang ada.

2.3.2. KESIAPAN KELEMBAGAAN DAERAH

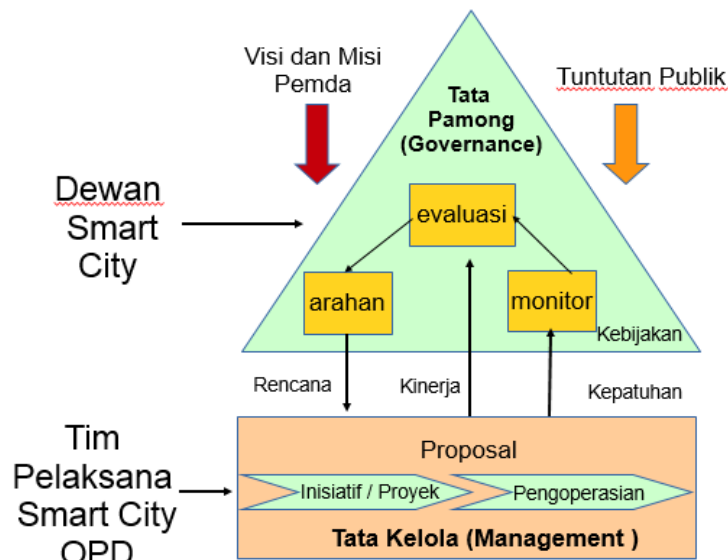
Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *smart city* di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, pembagian peran telah diatur dalam Keputusan Walikota Bogor Nomor 040.45-230 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan *Smart city* Dan Tim Pelaksana *Smart city* Kota Bogor Tahun 2017.



Gambar 14. Membangun Kesiapan Menjadi Smart City

Setiap perangkat daerah terlibat dalam Dewan *Smart city* dan Tim Pelaksana *Smart city* yang dilengkapi dengan kewenangan tugas/fungsi sebagai berikut:

a. Dewan *Smart city* :



Gambar 15. Dewan Smart City (model dari IT Governance)

1. Memberikan arahan strategis pengembangan *Smart city* sesuai dengan visi, misi dan perkembangan kebutuhan.
2. Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana induk *Smart city*, rencana kerja dan inisiatif pengembangan *Smart city*.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan implementasi *Smart city*.

- b. Tim Pelaksana *Smart city* :
1. Memberikan usulan program dan kegiatan pembangunan *Smart city* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor.
 2. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan *Smart city* dalam sektor tertentu maupun lintas sektor secara terkoordinasi melalui kajian kebutuhan, perencanaan, perancangan, pembangunan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 3. Menindaklanjuti arahan Dewan *Smart city*.
 4. Merumuskan inisiatif inovasi terkait *smart city* di berbagai sektor/PD dan mengusulkan kepada Dewan *Smart city* untuk arahan dan persetujuan.
 5. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart city* secara terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor (lintas PD).
 6. Melaporkan hasil kegiatan perencanaan, pengembangan dan implementasi *Smart city* kepada Dewan *Smart city*.
 7. Memfasilitasi forum-forum dan bentuk program lain yang mewadahi partisipasi pelaku usaha, komunitas dan masyarakat luas.
 8. Melakukan koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan *Smart city*.
 9. Membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pengembangan *Smart city*.

Adapun susunan keanggotaan Dewan *Smart city* dan Tim Pelaksana *Smart city* adalah sebagai berikut :

A. Dewan *Smart city*

- I. Ketua : Wali Kota Bogor
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- III. Anggota :
1. Sekretaris Daerah Kota Bogor
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor
 3. Inspektur Kota Bogor
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
13. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor
15. Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kota Bogor
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
18. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
19. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor
20. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor
21. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bogor

B. Tim Pelaksana

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Layanan *e-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- IV. Kelompok Kerja Perencanaan *Smart city*
 - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Pengawasan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
- c. Anggota : 1. Para Sekretaris Badan, Dinas dan Kecamatan
2. Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor
3. DR. Yani Nurhadryani.SSi. MT (Institut Pertanian Bogor)
4. M. Iqbal Suriansyah, M.Kom (Universitas Pakuan Bogor)
5. Bayu Adhi Prakosa, S.Kom, M.Kom (Universitas Ibnu Kaldun Bogor)
6. Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor

II. Kelompok Kerja Pengembangan *Smart city*

- a. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- c. Anggota : Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
Pelaksana pada bidang Layanan e-Government

III. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi *Smart city*

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- b. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim pada Dinas

- Lingkungan Hidup Kota Bogor Bogor
- c. Anggota : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
- Kasi Tata Kelola e-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

2.3.3. KESIAPAN ORGANISASI MASYARAKAT DAERAH

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *smart city* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *smart city* karena di dalam sebuah *smart city*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *smart city*.

Di Kota Bogor terdapat beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Pakuan, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Bina Sarana Informatika, STIE Triguna, STIE Kesatuan, STIE Bina Niaga. Dari beberapa perguruan tinggi tersebut, 3 perguruan tinggi yaitu IPB, Ibnu Khaldun dan Pakuan memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor serta dilibatkan dalam Tim Pelaksana *Smart city* Kota Bogor. Selain itu, adanya forum-forum swadaya masyarakat yang tergabung dalam komunitas-komunitas hobby dan profesi secara nyata telah mendorong *smart city* ke arah tatanan implementatif.

Komunitas-komunitas tersebut antara lain Forum Bogor Ngariung yang menaungi tidak kurang dari 96 komunitas, Relawan TIK Kota Bogor, Forum Pimpinan Media Digital Bogor, Wirausaha Pelajar Indonesia dan komunitas Kewirausahaan Pemuda / Pemuda Pelopor. Pemerintah Kota Bogor sampai dengan saat ini melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas tersebut dalam bentuk antara lain : penyelenggaraan Jambore Komunitas, Jambore Pemuda, Kompetisi Pemuda Pelopor, Kompetisi Kewirausahaan Pemuda, Pembinaan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro serta kecil menengah (UMKM) yang kesemuanya diintervensi dalam APBD Kota Bogor.

3

ANALISIS KESENJANGAN STRATEGIS

Seperti halnya setiap daerah dan organisasi, adanya suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah sebuah keniscayaan. Begitu pula halnya dengan Kota Bogor. Secara nyata ditemukan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan daerah memiliki e-leadership2. Adanya regulasi terkait kebijakan TIK3. Sudah ada SKPD Kominfo4. Memiliki 70 SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK, ditambah dengan SDM yang berpengalaman TIK meskipun tidak berlatar belakang pendidikan TIK5. Sudah memiliki banyak aplikasi e-Government, baik yang dibangun Kominfo maupun SKPD lain6. Sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh SKPD sampai dengan kelurahan6. Adanya peluang untuk membangun datacenter sendiri7. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyusun perencanaan e-govt yang komprehensif8. Pernah memperoleh award untuk website terbaik dan pengembangan e-Gov	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk membangun e-Govt2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-govt yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah kota3. SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK4. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi5. Belum memiliki perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang6. Belum memiliki datacenter / data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai7. Belum adanya perencanaan induk dan detailnya utk pengelolaan e-govt yang komprehensif yang bisa dijadikan acuan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan perencanaan lainnya8. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi e-govt9. Semakin menurunnya hasil Pe-GI

Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik2. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional3. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat thd layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan kota4. Peningkatan peran e-government dalam pembangunan kota	<ol style="list-style-type: none">1. Memahamkan kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta karyawan tentang peran strategis e-Govt yang sejalan dengan pembangunan kota2. Banyaknya kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-govt3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan sistem

Untuk mengatasi tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah, maka ada beberapa strategi yang perlu dirumuskan sebagai berikut :

Strategi S-O
<ol style="list-style-type: none">1. Manfaatkan pimpinan yang peduli dengan e-Govt untuk meningkatkan peran TIK pada proses birokrasi dan mendorong tercapainya good governance2. Optimalisasi kewenangan SKPD Kominfo untuk melengkapi berbagai regulasi dan SOP untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas3. pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang berlaku untuk semua unit kerja4. Adanya kebijakan pengarahannya dari pimpinan daerah, serta alat kontrol dan monitoring untuk implementasi e-govt5. Restrukturisasi Organisasi untuk optimasi fungsi pengembangan dan pengelolaan TIK6. Peningkatan kerjasama dengan instansi pusat, sesama pemerintah daerah, konsultan profesional dan pihak ketiga untuk pengembangan e-Govt

Strategi S - T
<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan SDM TIK untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK diseluruh SKPD2. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM TIK untuk selalu mengikuti perkembangan Trend Teknologi Informasi terbaru3. Koordinasi antar SKPD untuk pengembangan aplikasi eGovernment dan infrastruktur TIK4. Koordinasi dengan SKPD pengelola infrastruktur kota, untuk pelaksanaan instalasi dan pemeliharaan jaringan TIK5. Perlunya dibuat perencanaan pengembangan e-gov yang komprehensif dan berkesinambungan yang disepakati oleh seluruh SKPD dan disetujui oleh pimpinan daerah
Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan aplikasi eGovernment terintegrasi dalam bentuk sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif dan sistem informasi bantuan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja aparat pemko, pengembangan dunia usaha dan layanan masyarakat2. Pengembangan website Pemko yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi sistem pelaporan dan layanan masyarakat3. Bersama seluruh SDM penyelenggaraan TIK untuk meraih penghargaan nasional bidang e-govt4. Pengembangan standar data, aplikasi dan perangkat TIK pemko Bogor
Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan infrastruktur TIK yang optimal untuk memberikan jaminan akses jaringan layanan TIK pada aparatatur Pemko di seluruh SKPD dan layanan masyarakat2. Koordinasi antar SKPD untuk sistem pengamanan informasi3. Sosialisasi pemahaman kepada seluruh stakeholder, aparat pemerintah kota serta masyarakat untuk semakin meningkatkan pemanfaatan TIK.4. Melengkapi investasi infrastruktur TIK untuk menjamin keberlangsungan sistem dan meningkatkan sistem keamanan informasi

4

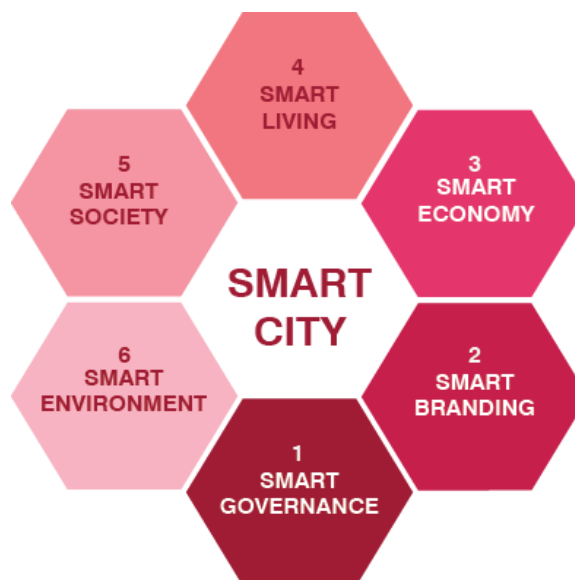
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA BOGOR

4.1. SASARAN *SMART CITY* DAERAH

Kunci utama dalam upaya pengembangan Kota Cerdas adalah adanya kemauan untuk berubah dan adanya keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas dan pelaku usaha (*quadruple-helix*) dalam berbagi peran dan tugas, sehingga menghasilkan upaya yang integratif, kolaboratif dan sinergis dalam penumbuhkembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Kota cerdas merupakan konsep yang harus dikembangkan bersama-sama dan disesuaikan dengan tujuan dan misi pembangunan, kebutuhan, serta kondisi Kota Bogor. Pengembangan kota cerdas diharapkan tidak hanya menjadi sebuah program dan *branding* sesaat, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pengembangan dan pembangunan kota yang berkelanjutan (*self sustain development*).

Kota cerdas yang dibangun pada prinsipnya berbasis pada potensi lokal sebagai keunggulan dan identitas daerah yang akan menjadi sumber energi baru untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mampu menjadikan Kota Bogor sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah (*hinterland*) sekitarnya. Selain itu, kebijakan kota cerdas juga harus dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi di seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Desain struktur smart city Kota Bogor yang akan dibangun melingkupi enam dimensi sebagai berikut :



Gambar 16. 6 Elemen Smart City
Sumber : CitiAsia Inc.

- 1) Smart Governance
- 2) Smart Branding
- 3) Smart Economy
- 4) Smart Living
- 5) Smart Society
- 6) Smart Environment

Pada tahun 2015, Kota Bogor telah memiliki Ruang Terbuka Hijau sebesar 14 persen. Kota Bogor juga memiliki 27 taman kota yang telah berfungsi dengan baik. Program edukasi “Bogor Education Fair” khususnya untuk para pelajar di Kota Bogor telah dijalankan selama dua tahun terakhir. Trans-Pakuan, bus kota yang bahan bakarnya bersumber dari energi alternatif telah beroperasi secara kontinu dari tahun 2007 dan merupakan salah satu transportasi jangka panjang serta ramah lingkungan. Sistem website Kota Bogor juga sudah terintegrasi menjadi satu (*all in one*) dengan semua informasi yang sudah disediakan melalui website tersebut. Terlebih, sejak tahun 2015, Kota Bogor telah memiliki ruang kontrol Smart City yang diberi nama “Green Room”.

Kegiatan dan program yang disebutkan telah mampu menjadi indikator untuk menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu *Smart City* di Indonesia. Meskipun dalam prosesnya mengubah perilaku masyarakat ‘konvensional’ menjadi masyarakat melek teknologi adalah sesuatu yang menjadi tantangan, akan tetapi Pemerintah Kota Bogor, masyarakat dan segala perangkat yang ada di dalamnya memiliki peran penting dalam keberlangsungan Kota Bogor untuk mendapatkan pencapaian tersebut, karena Kota Bogor dengan segala potensi yang dimilikinya sangat layak dicanangkan menjadi salah satu “*Smart City*” di Indonesia.

4.1.1. Smart Governance

Perencanaan pembangunan smart city dalam dimensi smart governance diharapkan mampu mengubah pola pikir apatis dan pesimis menjadi pola pikir yang prospektif, inovatif, adaptif dan optimis yang nantinya mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan aspek Smart Governance dengan baik. Dengan mengakses <http://kotabogor.go.id/> masyarakat mampu mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Informasi berita kota bogor, transparansi anggaran daerah, profil wilayah kota bogor, aspirasi warga kota bogor, hingga pelayanan kota bogor. Dalam setiap menu yang tersedia, terdapat percabangan informasi lagi, seperti pelayanan kota bogor yang di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil (pembuatan akta kelahiran,

kartu keluarga, kartu tanda penduduk), segala jenis perizinan, mulai dari pajak, retribusi daerah hingga ketenagakerjaan.

Semua informasi mengenai persyaratan, alur dan prosesnya juga disediakan dalam web tersebut. Tidak hanya itu, sistem pengaduan masyarakat, pelacak lokasi kota bogor, bahkan hingga informasi kota mengenai hotel, akomodasi, agenda kota bogor, maupun kuliner juga tersedia. Berbicara tentang kuliner, Jalan Suryakencana yang berlokasi dekat dengan Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat kuliner dan pusat cinderamata Kota Bogor.

Lokasi tersebut bisa diberdayakan dengan konsep pedestrian mall seperti yang telah diterapkan di La rambla Barcelona. Berdasarkan penelitian beberapa ahli perencanaan dan arsitektur perkotaan pada beberapa kota-kota besar di Eropa, pedestrian mall dapat meningkatkan jumlah pengunjung suatu kawasan sampai 50% dan pedestrian mall juga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang eceran dan toko-toko sebesar 25 sampai dengan 40%. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha masyarakat kota bogor. Secara keseluruhan, Smart Government harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kemudahan akses all-in-one. Tidak ada lagi kebingungan, antre panjang di berbagai instansi pemerintahan, dan mengisi formulir kertas berlembar-lembar.

Pembangunan smart governance dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Pelayanan publik
 - 2) Implementasi dan pengembangan aplikasi Smart dibidang perijinan dan penanaman modal, aplikasi Pajak on line, SIM Wilayah/Paten, SIM Puskesmas, sistem rujukan maternal, Verifikasi NIK, aplikasi tata kelola angkutan umum, dan aplikasi selfregister layanan administratif.
 - 3) Pengembangan aplikasi SIMATA yang memberikan informasi bagi masyarakat tentang pemerintahan, lalu lintas, pemantauan area publik, penyediaan bahan pokok, dan kebutuhan jasa lainnya.
- b. Manajemen birokrasi yang efisien
 - 1) Implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan (SIMRAL) serta e-SAKIP.
 - 2) Interoperabilitas data penduduk dalam aplikasi SITANDUK /SIAK, Simpeg, Smart dan Pajak on line melalui data warehouse dengan aplikasi di bidang pelayanan publik melalui aplikasi SIM Wilayah/Paten, SIM Puskesmas, Verifikasi NIK, Bogor Green Room, dan Dashboard pemerintah dengan konten updating informasi di bidang ekonomi, sosial dan politik.
 - 3) Implementasi dan pengembangan e-surat dan digital office.

- 4) Pembangunan Data Center yang representatif dan berstandar serta pembangunan City Operation Center.
- c. Efisiensi kebijakan publik
- 1) Implementasi dan pengembangan aplikasi Walikota Menyapa, Pengaduan on line, Nomor Tunggal Penanggulangan Kedaruratan (NTPD) 112, e-Musrenbang.
 - 2) Ekspose kebijakan pemerintah secara on line dan transparan dalam web kotabogor.go.id, Siskum dan SIM Pendataan Kesetaraan.

4.1.2. Smart Branding

Konsep branding daerah difokuskan pada peningkatan brand value daerah yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Kota Bogor akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Smart branding dilakukan pada beberapa indikator :

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*)
- 1) Melakukan artikulasi secara sistemik dan integratif pada destinasi wisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal.
 - 2) Menggali nilai lokal dan mengadopsinya dalam pembangunan kepariwisataan untuk membangun Point of Difference pariwisata dengan meningkatkan keunikan, kekhasan, lokalitas dan keutuhan etika.
 - 3) Membangun budaya yang ramah melalui sosialisasi dan pelatihan keramahtamahan (*hospitality training*) bagi para pelaku pariwisata.
- b. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*)
- 1) Updating ekspose produk daerah melalui web kotabogor.go.id
 - 2) Updating ekspose konten pariwisata Kota Bogor untuk jenis wisata alam, wisata pendidikan, wisata hiburan, wisata kuliner, wisata belanja, wisata cinderamata, wisata hotel, wisata melalui travel agent.
- c. Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*)
- 1) Mengukuhkan jatidiri Kota Bogor sebagai Kota Heritage (Kota Pusaka) yang memiliki bangunan-bangunan bernilai tinggi sejarah yang ditopang oleh arsitektur kota yang post-modern, kombinasi dari arsitektur modern yang dibalut oleh arsitektur klasik kolonial.

- 2) Melakukan penataan taman-taman di Kota Bogor menjadi taman tematik sebagai sentral kegiatan masyarakat dan wisata taman yang ramah anak, ramah lansia dan ramah hobby.
- 3) Membangun dan Mengembangkan sistem penampilan informasi destinasi wisata dan pusaka Kota Bogor berbasis teknologi multimedia *augmented reality* melalui smartphone dan tablet yang terkait dengan gambar situasi kota.
- 4) Melakukan preservasi terhadap situs-situs bersejarah, objek dan subjek kota pusaka, serta fasilitas publik yang mengukuhkan Kota Bogor sebagai Kota Hijau, Kota Sejuta Taman, Kota Halal, Kota Pusaka, Kota Pelari, Kota Ramah Anak, Kota Hujan, dan Kota Kuliner.

4.1.3. Smart Economy

Smart economy dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Ekonomi cerdas merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi cerdas di Kota Bogor pun akan dilakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang semakin hari cenderung semakin meningkat.

Elektronifikasi sistem pembayaran dapat dilakukan dengan jalan mengubah transaksi dari manual menjadi elektronik, dari pembayaran tunai menjadi non tunai, serta dari eksklusif menjadi inklusif. Sedangkan, pengendalian gratifikasi di lingkungan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah harus ditegakkan untuk menekan peluang gratifikasi yang tidak diperbolehkan berlangsung antara pihak swasta, masyarakat dengan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembangunan ekonomi cerdas akan dilakukan terhadap beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing
 - 1) Memberikan pelatihan pembuatan desain kemasan dan hak cipta bagi pelaku usaha dan masyarakat.
 - 2) Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce kepada para pemuda pelaku usaha dan komunitas start-up.
 - 3) Membuat dan mengembangkan forum wira usaha pemuda dan wira usaha pelajar.

- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat
 - 1) Membangun sistem datafication yang bertujuan mengusahakan semua aktivitas bisnis dapat direpresentasikan dalam bentuk data dan tercatat dengan penguatan kegiatan di sektor pengumpulan data, data entry, crawling data, data analytics dan lain-lain.
- c. Membangun ekosistem transaksi keuangan
 - 1) Merancang dan mengembangkan sistem transaksi pembayaran angkutan kota non tunai.
 - 2) Merancang dan mengembangkan sistem transaksi pembayaran non tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyerapan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 - 3) Mempromosikan dan menggandakan jumlah e-Warung (e-Warung) di lingkungan permukiman dan perumahan.
 - 4) Merancang dan mengembangkan proyek pilot pasar tradisional ke dalam ekosistem ekonomi digital dengan sistem pembayaran non tunai secara klaster dan bertahap.

4.1.4. Smart Living

Sasaran dari smart living sebagai salah satu dimensi Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart Living diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Harmonisasi tata ruang wilayah
 - 1) Melalui Smart Living and Environment, rasa nyaman dapat diperoleh masyarakat dengan beberapa indikator sebagai berikut : kesehatan, perumahan, aksesibilitas, persampahan, energi, keanekaragaman hayati, air, teknologi, dan transportasi yang penggunaannya untuk melindungi dan memelihara lingkungan kota baik keamanan maupun alam. Sejak tahun 2015, Bogor telah memiliki 14% Ruang terbuka Hijau. Sebagai Kota Metropolitan yang memiliki luas wilayah sekitar 11.850 hektar, jumlah ruang terbuka hijau publik sebesar 14 persen merupakan pencapaian terbaik, dari 20% yang diamanatkan menurut UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang, karena belum banyak kota-kota besar di Jawa Barat maupun di Indonesia yang mampu memenuhi sebesar 10 persen. Menurut Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, pembangunan taman di Kota Bogor mulai diperbanyak sejak tahun 2011. Sampai akhir 2014 sudah ada 27 taman aktif yang dibangun baik ukuran kecil maupun besar. Saat ini, Kota Bogor juga tengah menggalakkan

program “Bogor Sejura Taman”.Kondisi ini telah menjadi indikator bahwa Kota Bogor sudah layak untuk menuju Smart City, bahkan menuju Green City.

- b. Mewujudkan prasarana kesehatan
 - 1) 14% ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kota Bogor tidak hanya berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen diperkotaan, beberapa ruang terbuka hijau dikota bogor seperti taman ekspresi, taman peranganin, taman kencana hingga taman cora—coret dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat kota bogor, dan sarana aktivitas sosial bagi anak anak remaja maupun dewasa dan manula.
 - 2) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2009 Kota Bogor telah mempunyai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) serta Peraturan Walikota Bogor No. 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR. Hal ini disebabkan, kebiasaan merokok di kota Bogor telah merambah hingga kalangan anak dan remaja akibat dari gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2009, ada 8 kawasan yang ditetapkan KTR, yaitu tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan, dan sarana olah raga. Penerapan KTR di Kota Bogor masih belum sempurna. dilihat dari hasil kegiatan Tipiring, monitoring, dan sidak KTR pada Mei 2010 s.d. Desember 2016 menunjukkan masih banyaknya pelanggaran dilakukan.
 - 3) Dinas Kesehatan Kota Bogor telah membangun aplikasi SIM Puskesmas dan Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit bagi kejadian maternal (ibu melahirkan) yang dioperasikan secara online oleh seluruh bidan di Kota Bogor dengan pihak rumah sakit di Kota Bogor dan melaksanakan interoperabilitas data dengan SITANDUK/SIAK. Kedepannya, secara gradual, seluruh Puskesmas akan mengimplementasikan aplikasi SIM Puskemas.
- c. Menjamin ketersediaan sarana transportasi
 - 1) Upaya perbaikan sektor transportasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, mengingat luas wilayah kota yang sempit, tutupan luasan lahan yang tinggi, panjang jalan yang terbatas, lebar jalan yang kecil, terbatasnya lahan untuk pertumbuhan jalan baru, dan jumlah angkutan kota yang banyak, dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat tinggi, mendorong pemerintah untuk menyediakan alternatif transportasi dalam bentuk bus. TransPakuan adalah Bus rapid transit di Kota Bogor yang Dikelola oleh

PDJT dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 2007 dengan rute awal Bubulak-Br.siang, terdapat sekitar 16 halte di jalur itu juga telah beroperasi. Direncanakan, dalam jangka panjang bus TransPakuan akan sepenuhnya menggantikan angkutan kota yang saat ini menggunakan kendaraan minibus kecil.

- 2) Pemerintah Kota Bogor melakukan rekayasa lalu lintas di seputaran Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor dengan pemberlakuan Sistem Satu Arah seputaran jarum jam.
- 3) Dikeluarkannya kebijakan menihilkan penyeberang jalan di Jl. Kapten Muslihat bagi para pelaju kereta yang beraktivitas ke dalam dan ke luar Stasiun Kota Bogor dengan jalan merubah kebiasaan masyarakat melalui pemagaran median jalan dan fungsionalisasi jembatan penyeberangan orang.
- 4) Telah dilakukan rerouting angkutan kota secara bertahap dan menetapkan 7 koridor utama yang nantinya di 7 rute koridor tersebut akan dilayani oleh Bus TransPakuan.
- 5) Melaksanakan pembangunan Jalan R3 yang sejajar dengan Jl. Tajur-Wangun (jalan negara) dengan tujuan memecah konsentrasi penumpukan kendaraan di Jl. Tajur-Wangun, dilanjutkan ke pembangunan ruas Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang nantinya bersifat looping, menjadi jalan lingkaran dalam kota yang sekaligus terintegrasi dengan jalur on ramp/ off ramp Tol Bocimi dan jalan lingkaran luar kabupaten bogor yang mengarah ke dramaga.
- 6) Perencanaan MRT Kota Bogor yang bersifat Fly Over dengan koridor layanan R3 – Tanah Baru.
- 7) Pembangunan pedestrian yang representatif dan juga fungsional bagi kaum difabel.
- 8) Akan dilakukan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) tag yang bersifat aktif pada setiap angkutan dalam kota yang interkoneksi dengan SIMATA dan ATCS Dinas Perhubungan Kota Bogor yang secara real time dapat terbaca oleh CCTV Kota Bogor dalam bentuk Data Analytics bahkan dapat dilacak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya.
- 9) RFID tag aktif ini ke depannya akan diajukan untuk penggunaan pada point of sale yang menggantikan kasir dengan suatu mesin otomatis tanpa harus melakukan TransPakuan adalah Bus rapid transit di Kota Bogor yang dikelola oleh PDJT dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 2007 dengan rute awal Bubulak-Br.siang, terdapat sekitar 16 halte di jalur itu juga telah beroperasi.
- 10) Akan dilakukan penataan pada persimpangan-persimpangan jalan vital yang sebidang dengan Rel Kerata Api, diantaranya Jl. RE. Martadinata dan Jl.

Kebon Pedes dengan menggunakan rekayasa enjening, baik fly over maupun under pass.

4.1.5. Smart Society

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Inisiatif pembangunan Smart Society diantaranya dapat dilakukan atas indikator sebagai berikut:

- a. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien
 - 1) Sumber daya manusia yang ada di Kota Bogor memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi “smart people”. Berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional, jumlah penduduk Kota Bogor pada usia kerja (15 tahun ke atas) di tahun 2013 terdapat sebanyak 749.031 orang. Dengan kata lain, Kota Bogor memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak. Dengan modal dasar tersebut, maka dibangunlah sistem :
 - a) **Wide Pedestrian** (walker, bicycle, disability) seputaran Kebun Raya Bogor.
 - b) **Smart Street Lighting** (automatic on-off, energy usage detection, CCTV monitor).
 - c) **Gardens and Public Space** (recreation, study, sport, building healthy culture, building healthy family togetherness).
 - d) **One Way System Transportation Around Botanical Garden** (minimizing vehicycle crossing ways, people crossing street).
 - e) **No Smoking Area**: Public Transportation, Offices, all in 8 areas.
 - f) **Mobil Curhat**: Free Consultation Car by Dinas Kesehatan.
 - 2) Dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, masyarakat dapat berpartisipasi dengan akses melihat nilai-nilainya berapa melalui website pemerintah kotabogor.go.id
 - 3) Penggunaan fasilitas publik Layanan pengaduan online dapat membantu untuk pemerintah memantau keamanan masyarakat sehingga masyarakat aman dan tertib. Aplikasi-aplikasi yang bisa di-install di perangkat bergerak, gadget dan smartphone serta diakses di Internet juga membuat masyarakat dapat melihat apa-apa saja dan bagaimana kinerja pemerintah, pun melaporkan keadaan misal kecelakaan, tindak korupsi maupun kejahatan dan pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah dengan sangat mudah.

- 4) Kota Bogor kedepannya akan merencanakan dan mengembangkan pedestrian mall yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung suatu kawasan sampai 50% dan pedestrian mall juga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang eceran dan toko-toko sebesar 25 sampai dengan 40%. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha masyarakat kota bogor.
- b. Membangun ekosistem belajar yang efisien
- 1) Dalam membangun ekosistem belajar yang efisien, di kota Bogor telah dilaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online, untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK.
 - 2) Dari persepsi teknologi, pembangunan ekosistem belajar yang cerdas mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta internet. Oleh karena itulah Kota Bogor perlu mencontoh dan mengembangkan perpustakaan digital yang telah dibangun oleh LIPI di Kebun Raya Bogor.
 - 3) Pelaksanaan e-Learning telah dilaksanakan di beberapa sekolah negeri dan swasta di Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya di sekolah, e-Learning merupakan bentuk kegiatan belajar mengajar dengan media Internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone.
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat
- 1) Pemerintah Kota Bogor saat ini telah mengembangkan sistem kewanitaan lingkungan dan keamanan masyarakat dalam bentuk aplikasi cerdas :
 - a) **Katulampa Water Level Monitoring** (Flood), sistem monitoring tingkat ketinggian air Bendungan Katulampa yang ditengarai sebagai penyebab utama banjir di Jakarta akibat luapan Sungai ciliwung.
 - b) **Tree Cencuss** for preventing unpredictably Breaking Down Trees), berupa kartu tanda pengenal pohon yang dipasang di batang pohon dan berisi informasi mengenai kepadatan kayu, usia dan data periodik kapan harus dilakukan intervensi terhadap pohon tersebut.
 - c) **Dashboard Smart System**: Economy, Social and Politic Situation: 9 Prioritized Commodity's Price, biasa juga disebut dengan SIM EKSOTIK (Ekonomi, Sosial dan Politik) yang juga menampilkan situasi fluktuasi harga, supply dan demand atas 9 komoditas bahan pokok (sembako).
 - d) **Smart Energy**: Electic Usage Monitoring,yaitu aplikasi untuk memonitor kondisi penerangan jalan umum, berapa banyak yang menyala, mati ataupun rusak, bahkan mampu mengkalkulasi dan mengestimasi nilai kerugian yang mungkin muncul.
 - e) **GPS Tracker** : Rubbish Truck, Ambulance, Fire Fighter. Pemasangan aplikasi ini digunakan untuk mengontrol posisi 3 sarana publik tersebut,

dimana, sedang apa, akankemana dan berapa kali ritasi yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya.

- f) **CCTV Camera for Public Spaces/ Gardens Smart Transportation System:** Manageable CCTV and Traffic Light. Yaitu sistem CCTV dan lampu lalu lintas yang dapat diremote dari ruang kontrol ATCS Dishub.
 - g) **Direct Alarm Button :** Spreading information directly to whole personnels **In Aware** Disaster Management. Ini merupakan sistem Panic Button yang dikelola oleh BPBD Kota Bogor, terintegrasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan kebencanaan daerah.
- 2) Pemerintah Kota Bogor menempatkan pos pemadam kebakaran di 3 titik vital dengan tujuan untuk memenuhi SOP waktu tempuh terhadap kejadian kebakaran. Selain itu, aparatur wilayah (kecamatan dan kelurahan) telah diberi pelatihan tanggap bencana dan peralatan dasar penanggulangan kebencanaan yang diakibatkan oleh angin puting beliung, atap roboh dan pohon tumbang.
 - 3) BPBD Kota Bogor secara berkesinambungan selalu melakukan latihan penanggulangan bencana, sosialisasi mitigasi bencana dan pengecekan kesiapan mitigasi bencana di gedung-gedung yang ada di Kota Bogor secara berkala.

4.1.6. Smart Environment

a. Mengembangkan program proteksi lingkungan

Sejak tahun 2015, Bogor telah memiliki 14% Ruang terbuka Hijau. Sebagai Kota Metropolitan yang memiliki luas wilayah sekitar 11.850 hektar, jumlah ruang terbuka hijau publik sebesar 14 persen merupakan pencapaian terbaik, dari 20% yang diamanatkan menurut UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang.

Tidak hanya berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen diperkotaan, beberapa ruang terbuka hijau dikota bogor seperti taman ekspresi, taman peranganin, taman kaca hingga taman corat-coret dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat kota bogor, dan sarana aktivitas sosial bagi anak anak remaja maupun dewasa dan manula. Sampai akhir 2014 sudah ada 27 taman aktif yang dibangun baik ukuran kecil maupun besar. Saat ini, Kota Bogor juga tengah menggalakkan program “Bogor Sejura Taman”.Kondisi ini telah menjadi indikator bahwa Kota Bogor sudah layak untuk menuju Smart City, bahkan menuju Green City.

b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah

- 1) Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah, dan tempat pengolahan

sampah terpadu 3R, untuk mengatasi permasalahan persampahan. Untuk penguatan program 3R, 10 orang petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta BPLH telah diberangkatkan ke Hiroshima, Jepang untuk mendapatkan pelatihan cara pengolahan sampah

- 2) “Garbage that is Not Garbage” merupakan program di Kota Bogor yang aktivitasnya adalah “Pembelian Sampah” di level masyarakat lokal melalui Bank Sampah yang saat ini sudah berdiri dan operasional di Tingkat Kota Bogor.
 - 3) Tingkat pelayanan pengambilan sampah sebesar 74% sudah mencakup tingkat penanganan sampah sebesar 65% dari sumber ke TPS dan TPS3R berhasil memberikan kontribusi tingkat pengurangan sampah sebesar 9%
- a. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab

Berbicara tentang transportasi jangka panjang dan penanggulangan limbah, Kota Bogor juga sudah menerapkan program tersebut secara kontinu, yaitu limbah minyak jelantah yang dijadikan biodiesel sebagai bahan bakar TransPakuan. TransPakuan adalah Bus rapid transit di Kota Bogor yang dikelola oleh PDJT dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 2007 dengan rute awal Bubulak-Br.siang, terdapat sekitar 16 halte di jalur itu juga telah beroperasi. Transpakuan lahir akibat latar belakang perlunya kampanye kesehatan pengurangan penggunaan minyak jelantah, dilakukannya program yang berkontribusi pada perbaikan lingkungan, dan fakta bahwa pengolahan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel dapat dilakukan dengan proses yang sangat sederhana, bahkan dalam skala rumah tangga, maka Pemerintah Kota Bogor meluncurkan inisiatif pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel.

Sejak Tahun 2007 Kota Bogor sudah menjadi anggota dari international Council for Local Environment (ICLEI), yaitu asosiasi dari kurang lebih 600 kota sedunia yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup dengan mengendalikan pemanasan global, melalui Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang salah satunya berasal dari emisi kendaraan bermotor. Bertitik tolak dari hal tersebut, sejak tahun 2007 pula Pemerintah Kota Bogor melaksanakan kegiatan pengolahan limbah minyak jelantah menjadi bahan bakar (biodiesel), dimana biodiesel yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar alat transportasi ramah lingkungan (bus Trans Pakuan).

4.2. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai *hinterland city* dari ibukota negara, Kota Bogor dalam Visi dan Misi-nya telah mencantumkan target pencapaian masa depan sebagai kota cerdas yang berwawasan teknologi informasi dan komunikasi. Cita-cita ini muncul sebagai suatu bentuk kesadaran akan masa depan yang dinamis dengan perkembangan teknologi

yang semakin maju. Menjadi kota penyangga ibukota yang telah sedemikian maju memberikan tantangan tersendiri bukan hanya kepada aparatur pemerintahan namun juga kepada seluruh stakeholder daerah, masyarakat dan pihak swasta.

4.2.1. Visi Kota Bogor

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 mencantumkan 5 (lima) tahapan proses perencanaan pembangunan lima tahunan yang dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”. Adapun Visi Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “**Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan**” dengan pendekatan bahwa : visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu *nyaman*, *beriman* dan *transparan*. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Nyaman

Makna **Nyaman** merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait dengan kualitas lingkungan, yang mana kota dapat mencerminkan kondisi yang sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara) dapat dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman adalah kota yang baik secara klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Kondisi fisik lingkungan yang baik, dicerminkan juga dari sisi ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai untuk seluruh warga termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

Faktor kedua kondisi nyaman juga harus dipenuhi dari sektor ekonomi seperti dunia usaha yg kondusif; kemudahan mendapat pekerjaan; dan berkembangnya ekonomi kreatif. Sedangkan faktor terakhir adalah berkaitan dengan kultur masyarakat yang baik. Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub.

2. Beriman

Makna **Beriman**, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktivitas kehidupan beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang

dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktivitas. Harmonisasi pun tidak hanya terjadi diantara masyarakat saja, namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya nilai dan norma ditengah gencarnya dampak negatif dari arus globalisasi.

3. Transparan

Makna **Transparan**, lebih ditekankan pada proses berlangsungnya pemerintahan kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi, serta mengawal arah pembangunan kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain. Sebagai bagian dari transparansi, jalannya program-program pembangunan dapat diakses oleh masyarakat sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi.

Makna **Transparan** kemudian diartikan juga sebagai pemerintahan yang demokratis, yang mana pemerintah mampu menyerap aspirasi warganya. Selain itu, transparan mencerminkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan *e-government* secara adil, tepat, efektif, dan terintegrasi.

4.2.2. Misi Kota Bogor

Sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan Kota Bogor 2015-2019 tersebut, dirumuskan misi-misi Kota Bogor sebagai berikut

Misi Pertama : “Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi”

Kota yang cerdas direpresentasikan oleh iklim lingkungan belajar yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini diharapkan semakin berkembang dengan ketersediaan berbagai fasilitas yang mendorong kemudahan masyarakat untuk mengakses pengetahuan, utamanya lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat mengakses informasi yang luas dan mendorong terjadinya proses pengambilan keputusan publik yang cerdas. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dilakukan dengan basis Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi. Sistem Informasi Manajemen itu sekaligus menjadi decision support system sehingga proses pengambilan keputusan publik dapat dilakukan secara cerdas pula

Misi Kedua : “Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur”

Kota yang sehat mencerminkan masyarakat dengan kemudahan terhadap akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang memadai kemudian diimbangi pula oleh kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehat, mulai dari lingkungan rumah tangga sampai lingkungan perkotaan. Masyarakat yang sehat mendorong masyarakat yang lebih produktif sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan berkarya secara maksimal. Kesempatan untuk berkarya inilah yang menjadi kunci menuju kemakmuran. Selain itu, ketersediaan barang-barang konsumsi yang terjangkau menjadi penunjang bagi kemakmuran sebuah kota.

Misi Ketiga : “Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan”.

Wawasan lingkungan bukan hanya menjadi upaya namun juga menjadi budaya bagi setiap elemen masyarakat. Penerapan green city, rendah karbon, ramah lingkungan, penanganan sampah, diinternalisasikan sebagai gaya hidup. Kota yang berwawasan lingkungan didukung pula oleh peraturan-peraturan dan kebijakan yang menjamin upaya pelestarian dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan kota

Misi Keempat : “Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif”

Masyarakat dengan individu-individu yang kreatif dapat menumbuhkan industri kreatif, yang pada akhirnya dapat bersinergi dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata. Masyarakat tersebut dapat tumbuh ditengah-tengah karakter kota yang kuat. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya mendesain kota harus dilakukan secara komprehensif untuk seluruh sudut kota. Lanskap kota yang berbudaya menguatkan citra kota yang kemudian menjadi aset dan juga identitas kota. Hal tersebut diikuti dengan berkembangnya proses-proses kreatif sehingga industri-industri kreatif dapat terus tumbuh.

Misi Kelima : “Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan”

Pemerintah yang bersih merupakan pemerintah yang dapat menjamin tidak adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perjalanan roda pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi syarat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah aktif membuka diri bagi masyarakat dan juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi. Selanjutnya sinergitas dilakukan guna menyatukan berbagai potensi dan stabilitas kebijakan demi

kemajuan pembangunan kota.

Misi Keenam : “Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani”

Peran moral agama dan kemanusiaan bukan hanya menjadi hal yang tumbuh dan mempengaruhi ranah individual saja, namun dapat menjadi nafas penggerak pembangunan kota. Kota berkembang dimana masyarakat hidup rukun dan damai. Setiap warga, kelompok, atau lembaga menjadi agen pembawa kedamaian dan kesadaran bagi sesama untuk menerapkan nilai moral, agama, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan, sasaran dan strategi Pencapaian Misi 1 Kota Bogor adalah:

1. Meningkatkan implementasi e-government, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan strategi Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan strategi Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara *online* yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.
 - c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan komunikasi, dengan strategi Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik, instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya *e-literacy* (melek internet) bagi masyarakat luas.
2. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat, dengan sasaran:
 - a. Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat, dengan strategi menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas baca dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk

- mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
- b. Mengembangkan ruang kreasi, inovasi, dan berbagi untuk masyarakat, dengan strategi menyediakan ruang dan aktivitas yang dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif.
3. Mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan dengan strategi mengembangkan sistem perencanaan dan *monev* pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu diberikan pada fenomena
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan dengan strategi “kelelahan berpartisipasi” (*participation fatigue*), dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
 - c. Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan
 - d. Tersedianya *baseline* data yang kuat, akurat dan mutakhir, dengan strategi Membangun sistem basis data antar instansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang andal. *Baseline* data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision supporting system*) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari *baseline* data dan *decision supporting system*.
4. Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh berkompeten, dengan sasaran:
- a. Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter, dengan strategi Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.

- b. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal, dengan strategi Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas.
- c. Terciptanya generasi muda yang berprestasi, dengan strategi Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Misi 2 Kota Bogor adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, dengan strategi Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.
 - b. Menurunnya kasus penyakit menular, dengan strategi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular.
 - c. Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga, dengan strategi Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia.
 - d. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya, dengan strategi Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas permukiman, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak
 - b. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh
 - c. Tersedianya pelayanan air minum yang memadai, dengan strategi menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, *redeFsign* permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.
3. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel), dengan sasaran:

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas taman- taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman, dan ramah pengguna,
 - b. Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang public, dengan strategi Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Untuk itu pembangunan taman akan lebih mengutamakan pada perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan selain untuk menguatkan karakter Kota Bogor, juga dalam rangka pengayaan dan pemeliharaan jangka panjang taman-taman kota.
4. Meningkatkan Ketahanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran:
- a. Tertangani dan terfasilitasinya kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan strategi menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.
 - b. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin, dengan sasaran melakukan pembinaan terhadap kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program- program jangka pendek yang menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - c. Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dengan strategi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.
5. Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan dengan strategi Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang *up-to-date* dan iklim bekerja.
 - b. Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk

berkreasi dan berusaha di masyarakat

- c. Berkembangnya Agribisnis perkotaan, dengan strategi Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan.
- d. Terjaminya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat, dengan strategi Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

Tujuan, sasaran dan strategi dari pencapaian Misi 3 Kota Bogor adalah

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang, dengan Sasaran:
 - a. Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan
 - b. Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang, dengan strategi mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian.
 - c. Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dengan strategi membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting
 - d. Tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pasar tradisional, dengan strategi menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan, dengan strategi Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan.
 - b. Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam, dengan strategi Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.
 - c. Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan strategi Mewujudkan kota *riverfront* melalui sterilisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari aktivitas budidaya yang mengganggu. Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai *ecoregion* sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah.
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan strategi Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan

menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.

3. Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan, dengan strategi mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai.
 - b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda, dengan strategi peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program *Sustainable Urban Transport Improvement Project* (SUTIP GIZ) akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.
 - c. Berkurangnya kemacetan, dengan strategi menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (*park on ride*). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan *land banking*. Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan *non-motorized transport*.
4. Mendorong pembangunan kota yang tanggaprisiko bencana dan dampak perubahan iklim, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - b. Meningkatnya tanggap darurat saat bencana
 - c. Meningkatnya pemulihan pasca bencana
 - d. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan strategi Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, *green building*, dan partisipasinya dalam berbagai kampanye seperti *Earth Hour*.
5. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan persampahan, dengan strategi meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antar daerah untuk Tempat

- Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem *sanitary landfill* serta pelayanan pengangkutan sampah.
- b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dengan strategi Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (*Reuse Reduce Recycle*) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.
 - c. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat

Tujuan, sasaran dan strategi dari pencapaian Misi 4 Kota Bogor adalah

1. Menjadikan warisan budaya sebagai aset kota, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya, dengan strategi mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik yang bendawi maupun non bendawi.
 - b. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya, dengan strategi Memperkuat upaya pelestarian warisan budayamelalui pembuatan regulasi, kemitraan antarpihak, dan sarana prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.
 - c. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.
2. Menguatkan identitas dan citra kota bogor (*City Branding*), dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis, dengan strategi merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel dengan keberadaan KRB. Membangun regulasi yang kokoh sehingga pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema *Garden Compatible Development*
 - b. Diterapkannya konsep perencangan kota (*urban design*), termasuk *street furniture*, yang meningkatkan citra kota, dengan strategi membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan *City Branding*
 - c. Dijadikannya Bogor sebagai pusat pengetahuan dan penelitian bidang

- pertanian dan botani, dengan strategi mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
- d. Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (*Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events*), dengan strategi memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.
3. Mengembangkan pariwisata kota bogor yang berkarakter dengan sasaran:
 - a. Berkembangnya destinasi wisata
 - b. Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata
 - c. Berkembangnya Industri pariwisata, dengan strategi mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket sarpras pariwisata (peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), ptomosi dan pemasaran.
 4. Mengembangkan iklim ekonomi kreatif, dengan sasaran:
 - a. Terciptanya iklim industry kreatif
 - b. Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif
 - c. Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif

Dengan strategi sebagai berikut:

Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal melalui tahapan berikut:1) *Creative-waves*, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) *Creative-network*, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) *Creative-preneur*, orang-orang wirausahawan. Dibutuhkan model pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian **Misi 5** Kota Bogor adalah

1. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan strategi membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan.

- b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan strategi Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka.
 - d. Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah dan internasional, dengan sasaran:
- a. Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup.
 - b. Menguatnya kelembagaan kerja sama antar daerah dan internasional
Dengan strategi sebagai berikut:
Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur.
3. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya event- event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya, dengan strategi Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.
 - b. Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota
 - c. Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor, dengan strategi Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
 - d. Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota, dengan strategi Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis.
4. Menguatkan perundangan daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Tersusunnya perundangan daerah, dengan strategi Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah.
- b. Tegaknya perundangan daerah, dengan strategi Menegakkan peraturan perundangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.

Tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian Misi 6 Kota Bogor adalah :

1. Meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi kehidupan, dengan sasaran digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari melalui strategi mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan dalam penurunan kriminalitas dan penyakit masyarakat.
2. Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama, dengan sasaran:
 - a. Terselenggaranya aktivitas lintas agama, dengan strategi Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.
 - b. Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama, dengan strategi Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media.
3. Mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat, dengan sasaran meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat melalui strategi memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliyah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.